

PERAN BPD DALAM MONITORING DAN EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA SIHARE'O SIWAHILI

By MAURITIUS THEOZANOLO ZEBUA

**PERAN BPD DALAM MONITORING DAN
EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN
KINERJA PEMERINTAHAN DESA
SIHARE'O SIWAHILI**

SKRIPSI



Oleh:

**MAURITIUS THEOZANOLO ZEBUA
NIM 2319324**

49

Diajukan kepada:

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
39 DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Monitoring	10
2.1.1 Pengertian Monitoring	10
2.1.2 Sifat Monitoring Yang Efektif	11
44 2.1.3 Hal-hal Yang Meningkatkan Efektivitas Monitoring	12
2.1.4 Tujuan Monitoring	12
2.1.5 Jenis-jenis Monitoring.....	13
2.1.6 Unsur-unsur Mon 44 ing.....	14
2.1.7 Langkah-langkah Monitoring.....	15
2.1.8 Prinsip-prinsip Monitoring	16
44 2.1.9 Indikator Monitoring	16
2.2 Evaluasi.....	17
2.2.1 Pengertian Evaluasi	17
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi	18
2.2.3 Jenis-jenis Evaluasi	18
2.2.4 Prinsip-prinsip Evaluasi	46
2.2.5 Langkah-langkah Evaluasi	19
2.2.6 Indikator Evaluasi	20
2.3 Kinerja	20
2.3.1 Pengertian Kinerja.....	20
2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja	21
2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	21
3 2.3.4 Karakteristik Kinerja Yang Baik.....	22
2.3.5 Indikator Kinerja	22
2.4 Pemerintahan Desa.....	23
2.4.1 31 ngertian Desa.....	23
2.4.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
2.5 Kerangka Pemikiran.....	24
29 2.6 Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
3.2 Variabel Penelitian	32
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	33
3.4 Sumber Data.....	33
3.5 Instrumen Penelitian	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Desa Sihare'o Siwahili	39
4.1.1 Profil Desa Sihare'o Siwahili	39
4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa	40
4.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	40
4.1.3.1 Kepala Desa	40
4.1.3.2 Sekretaris Desa	41
4.1.3.3 Kepala Seksi Pemerintahan	42
4.1.3.4 Kepala Seksi Kesejahteraan	43
4.1.3.5 Kepala Seksi Pelayanan	43
4.1.3.6 Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	44
4.1.3.7 Kepala Urusan Keuangan	45
4.1.3.8 Kepala Urusan Perencanaan	45
4.1.3.9 Kepala Dusun	102
4.1.3.10 Badan Permusyawaratan Desa	47
4.2 Hasil dan Pembahasan	48
4.2.1 Kondisi Eksisting Indikator-Indikator Monitoring	48
4.2.2 Kondisi Eksisting Indikator-Indikator Evaluasi	53
4.2.3 Kondisi Eksisting Indikator-Indikator Kinerja	57
4.2.4 Keterkaitan Antar Indikator-Indikator	61
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili	66
4.4 Upaya BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili	52 67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	L-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Masalah-masalah Di Desa Sihare'o Siwahili Serta Penyebabnya	6
Tabel 2.6.1	Penelitian Terdahulu Serta Perbedaannya Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan	26
Tabel 3.3.1	Variabel Penelitian	32
Tabel 3.3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	33
Tabel 3.4.1	Data Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.4.1	Data Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.2.1.1	Kaitan Peran BPD Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	25
Gambar 4.1.1.1	Balai Desa dan Kantor Desa Sihare'o Siwahili	39
Gambar 4.1.2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	40

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat luas, dan negara yang luas tentunya harus mempunyai struktur pemerintahan yang kuat dari atas hingga ke bawah agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu lembaga pemerintahan tingkat bawah dan mempunyai jumlah yang sangat banyak di Indonesia adalah desa. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa beserta aparat-aparat desa lainnya, serta diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Dalam sebuah desa, BPD mempunyai peran penting tidak hanya dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga dari segi Monitoring dan Evaluasi (Monev), sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan suatu organisasi. Monitoring berperan penting dalam mengawasi berjalannya suatu kegiatan dalam organisasi, dan memastikan semua kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Hasil dari monitoring nantinya akan berpengaruh pada evaluasi personil-personil dalam organisasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi dalam mengambil langkah kedepannya, dan evaluasi pada akhirnya akan menjadi tolak ukur kinerja personil dalam organisasi. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi sebuah organisasi khususnya pemerintahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan baik, agar menghasilkan kinerja yang juga baik.

Menurut Suardan dkk (2017:77) monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur secara terus menerus. Menurut Azis (2016:150) evaluasi adalah suatu pengumpulan data dan menganalisis informasi tentang efektivitas dan dapat dari suatu tahap atau keseluruhan program. Menurut Robbins, termuat dalam jurnal *Monitoring dan Evaluasi terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMP Terpadu Al- Farabi Tanjung Selamat* (2023:4), kinerja adalah

ukuran mengenai apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh karyawan.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam suatu pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang penting dalam melakukan kegiatan Monev dalam suatu pemerintahan desa, dimana fungsi BPD dalam monitoring telah dimuat dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 31 huruf C dan Pasal 32 huruf J, dan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 55 huruf C dan Pasal 61 huruf A. Tugas BPD dalam evaluasi telah diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 32 huruf K, dan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 27 huruf C.

Berdasarkan peraturan diatas, maka dapat dilihat bahwa BPD berperan penting dalam kegiatan Monev suatu pemerintahan desa. Dalam peraturan tersebut, BPD berhak untuk melakukan monitoring dalam bentuk pengawasan kinerja kepala desa, serta mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. BPD juga berhak melakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Monitoring di desa tidak hanya dilakukan oleh BPD, tetapi secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan-keluhan yang mereka temukan melalui BPD sesuai dengan tugas BPD dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 60, dan Pasal 63, dan juga UU No. 6 tahun 2014 Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 63, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) dimana partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

¹ Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti dalam jurnal Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis oleh Heni Nur Irfiani (2018), ¹ dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, BPD ¹ sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ¹ maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya Lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD.

⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Maria Indah Kasih Ndraha, Ayler Beniah Ndraha, dan Yasminar Telaumbanua dalam jurnal Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido (2022), ⁵ peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih

dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

BPD memiliki ¹⁷ hubungan kerja langsung dengan seluruh personil pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat mulai dari penyusunan program desa yang harus dihadiri oleh BPD dan seluruh personil pemerintahan desa lainnya. BPD juga berhak mengawasi secara langsung pekerjaan dan program yang dilaksanakan seluruh personil pemerintahan desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, hingga Kepala Dusun. Selain itu BPD juga bertugas untuk menyerap aspirasi dan menampung permasalahan yang ditemui oleh warga desa karena salah satu tugas pokoknya adalah sebagai perwakilan dari masyarakat desa, sehingga BPD harus turun lapangan untuk melakukan survey secara langsung untuk memonitoring keluhan-keluhan masyarakat desa.

Ada beberapa masalah yang terdapat di desa Sihare'o Siwahili, salah satunya yaitu minimnya pemahaman tentang peran dan tupoksi BPD, yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya petunjuk dari camat atau atasan masih sangat kurang, serta buku panduan mengenai tugas pokok dan fungsi BPD masih belum dimiliki oleh setiap anggota BPD. Hal ini menjadi masalah seperti yang tertera dalam jurnal ⁷³ Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Oleh Darmi Roza dan Laurensius Arliman S (2017) yang menyatakan bahwa ²⁴ Tingkat pemahaman aparatur desa dan anggota BPD dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa.

Kemudian akses informasi dan data yang dimiliki oleh BPD sehingga masih minim, sehingga kesulitan dalam melakukan monev terhadap pemerintahan desa Sihare'o Siwahili. Hal ini disebabkan karena anggota BPD kurang memberi perhatian yang serius terhadap program yang diajukan pemerintahan desa. Selain itu pemerintahan desa juga kurang memberikan penjelasan secara mendetail tentang rencana dan program kerja pemerintah desa kepada anggota BPD. Seperti yang dimuat dalam jurnal ¹³⁸ Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di

Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis oleh Heni Nur Irfiani (2018) ketika informasi yang didapatkan BPD masih kurang, maka BPD akan kesulitan untuk menentukan proses apa saja yang selanjutnya akan ditempuh dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa Sihare'o Siwahili juga masih kurang, sehingga menghambat pembangunan desa Sihare'o Siwahili. Ini dikarenakan masyarakat desa Sihare'o Siwahili kurang peduli terhadap pembangunan desa jika mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan upah UMR. Padahal jika keterlibatan masyarakat ini dapat terselenggarakan dengan baik maka pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih baik lagi, sesuai yang dinyatakan dalam jurnal Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai) oleh Adrianus Uwang, Sukadi, dan I Wayan Kertih (2022) bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sangat diperlukan, diharapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan akan bisa tercapai.

Minimnya komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintahan desa dalam memajukan desa Sihare'o Siwahili juga menjadi suatu permasalahan yang tak bisa dipungkiri. Komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan aparat pemerintah desa yang mengambil alih semua pekerjaan yang telah diprogramnya dengan kurang melibatkan masyarakat desa. Sesuai dengan yang tertera dalam jurnal Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Sofian Malik (2020) bahwa dalam desa perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Hal lain yang menjadi perhatian yaitu kurangnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai peran dan tupoksi BPD di desa Sihare'o Siwahili. Ini dikarenakan pemerintah desa yang jarang memberikan

pengarahan serta bimbingan tentang pelaksanaan tupoksi BPD kepada masyarakat desa. Padahal menurut jurnal *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai)* oleh Adrianus Uwang, Sukadi, dan I Wayan Kertih (2022), diperlukan adanya sosialisasi terkait ruang lingkup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami apa perlunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam lembaga pemerintahan desa. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan sebagai salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD yang tidak diketahui oleh masyarakat

No.	Masalah	Penyebab
1.	Minimnya pemahaman tentang peran dan tupoksi BPD di Desa Sihare'o Siwahili.	Buku panduan untuk tupoksi BPD belum dimiliki oleh setiap anggota BPD. Kemudian petunjuk dari camat atau atasan bagi anggota BPD masih kurang.
2.	Minimnya akses informasi dan data yang dimiliki oleh BPD sehingga kesulitan dalam melakukan movev terhadap pemerintahan desa Sihare'o Siwahili.	Pemerintahan desa kurang memberikan penjelasan secara mendetail tentang rencana dan program kerja pemerintah desa kepada anggota BPD. Anggota BPD juga kurang memberi perhatian yang serius terhadap program yang diajukan pemerintahan desa.
3.	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa Sihare'o Siwahili.	Masyarakat desa kurang peduli terhadap pembangunan desa bila tidak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan upah UMR.
4.	Minimnya komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintahan desa dalam memajukan desa Sihare'o Siwahili	Aparat pemerintah desa mengambil alih semua pekerjaan yang telah diprogramnya dan kurang melibatkan masyarakat desa.
5.	Minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan tupoksi BPD di desa Sihare'o Siwahili	Pemerintah desa jarang memberikan pengarahan dan bimbingan tentang pelaksanaan tupoksi BPD.

Tabel 1.1.1 Masalah-masalah Di Desa Sihare'o Siwahili Serta Penyebabnya

Masalah masalah tersebut dapat dilihat melalui beberapa kasus seperti pada program pembagian bibit ikan lele kepada masyarakat desa,

dimana jumlah bibit lele yang seharusnya diberikan 300 bibit per keluarga penerima, tetapi yang diterima hanya 250 bibit atau bahkan kurang. Sebagian masyarakat yang diunjuk sebagai penerima bibit ikan lele juga menolak untuk menerimanya, karena tidak adanya bimbingan atau sosialisasi dari desa tentang pemeliharaan bibit ikan lele, serta kekhawatiran masyarakat akan besarnya biaya pakan serta pemeliharaan bibit ikan lele yang akan mereka diterima. Hal ini terjadi tanpa adanya pengawasan dari BPD, yang seharusnya bertugas untuk mengawasi mulai dari proses perencanaan hingga berjalannya program serta memonitor masyarakat yang menerima bibit ikan lele tersebut. Selain itu pada proyek pembangunan kamar mandi bagi masyarakat desa yang kurang mampu, bahan-bahan pembangunan yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Salah satu contohnya yaitu pada bahan baku seperti semen yang seharusnya dibagikan 10 sak, menjadi kurang dari 10 sak ketika diterima oleh masyarakat penerima bantuan.

Hal ini mendorong keingintahuan peneliti untuk meneliti peran BPD dalam berbagai macam kegiatan dan permasalahan dalam suatu desa baik itu dari segi komunikasi dan penyampaian aspirasi, hingga pengawasan dan pengevaluasian dalam pemerataan pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Minimnya pemahaman tentang peran dan tupoksi BPD di Desa Sihare’o Siwahili.
2. Minimnya akses informasi dan data yang dimiliki oleh BPD sehingga kesulitan dalam melakukan monev terhadap pemerintahan desa Sihare’o Siwahili.
3. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa Sihare’o Siwahili.
4. Minimnya komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintahan desa dalam memajukan desa Sihare’o Siwahili.

5. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan tupoksi BPD di desa Sihare'o Siwahili.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya bias pada pelaksanaan penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitian pada judul yang membahas tentang Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

1.4 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat BPD dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili?
3. Bagaimana upaya BPD dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat BPD dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili
3. Untuk mengetahui upaya BPD dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Secara teoritis : sebagai tambahan pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat/pembaca mengenai Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa.
- b. Secara praktis :
 - 1) Bagi peneliti⁴⁸
Untuk memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk memperluas wawasan pemikiran.
 - 2) Bagi Universitas Nias⁶¹
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lain di Universitas Nias.
 - 3) Bagi lokasi penelitian
Untuk menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menentukan langkah kedepannya
 - 4) Bagi peneliti selanjutnya¹⁷
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang berhubungan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Monitoring

40

2.1.1 Pengertian Monitoring

Monitoring dapat dipahami sebagai kegiatan, bertujuan untuk mengikuti suatu program yang dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan (Suardan dkk, 2017:77). Tentunya mengikuti suatu program yang dilaksanakan dengan rutin tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan untuk pemantauan program atau kegiatan yang hendak dilaksanakan. Siagian (2001:25) mengatakan bahwa monitoring adalah proses mengamati kinerja seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang diperlukan. Menurut Fietri dan Ilham (2021:25) monitoring adalah suatu siklus kegiatan yang mencakup proses pengumpulan, penelaahan laporan, dan bertindak berdasarkan informasi tentang proses yang sedang berlangsung. Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan (Inu Kencana Syafie, 2019:167).

32

Monitoring merupakan sebuah proses pengumpulan dan penelaahan informasi dari pelaksanaan sebuah program, termasuk secara berkala memverifikasi bahwa kegiatan atau program itu berjalan sesuai rencana untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi. Jadi, monitoring ialah pengumpulan data tentang kegiatan atau program untuk diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan pemantauan yang sedang berlangsung secara terus menerus (Azis, 2016:147). Menurut T. Hani Handoko (2003:359) monitoring didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen terpenuhi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas,

maka peneliti menyimpulkan bahwa monitoring adalah suatu kegiatan pengontrolan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa program atau kegiatan yang berlangsung dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan organisasi.

2.1.2 Sifat Monitoring Yang Efektif

Pengawasan yang efektif memiliki beberapa sifat. Organisasi yang baik tentunya memiliki sifat-sifat ini ketika melaksanakan monitoring. Menurut Harahap (2007: 246), ada beberapa sifat pengawasan yang efektif yaitu:

1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana.
2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
4. Pengawasan harus fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
5. Pengawasan harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat

sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah bagaimana membuat suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi.

2.1.3 Hal-hal Yang Meningkatkan Efektivitas Monitoring

Dalam melakukan pengawasan, tentunya harus dilaksanakan dengan efektif agar dapat berjalan sebaik mungkin. Ada beberapa hal yang dapat membuat monitoring menjadi efektif. Menurut Nawawi (2005:50) mengatakan bahwa pengawasan akan berjalan efektif jika:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif..
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.

2.1.4 Tujuan Monitoring

Pengawasan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi. Dengan terlaksananya pengawasan, maka dapat menjadi pengontrol dalam berjalannya suatu kegiatan. Menurut Husnaini (2009: 400), ada beberapa tujuan pengawasan diantaranya:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Adapun menurut Maringan (2004: 61) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.

2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

11

2.1.5 Jenis-jenis Monitoring

Dalam melakukan pengawasan, terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan. Manullang (2009:176) menyebutkan jenis-jenis pengawasan antara lain:

1. Berdasarkan waktu pengawasan. Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas:
 - a. Pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan atau *deviation*.
 - b. Pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai.
2. Berdasarkan objek pengawasan. Berdasarkan objeknya, pengawasan dapat dibedakan dalam bidang-bidang berikut:
 - a. Produksi, maka pengawasan ditujukan terhadap kuantitas dan kualitas hasil produksi maupun terhadap likuiditas organisasi.
 - b. Keuangan
 - c. Waktu, bermaksud untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak.
 - d. Manusia, dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatannya sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau *manuals*.
3. Berdasarkan subjek pengawasan. Jika pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan dibedakan atas:
 - a. Pengawasan intern. Pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan.
 - b. Pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern artinya orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2006 : 247), jenis pengawasan terdiri atas:

1. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.

- e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
2. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membandingkan hasil dengan rencana.
 - b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.
 3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
 6. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

2.1.6 Unsur-unsur Monitoring

Dalam melakukan suatu pengawasan, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Bambang (1999), seorang pakar, menguraikan unsur pengawasan yang terdiri dari:

1. Lingkungan pengawasan, merupakan unsur dasar dari proses pengawasan, di mana di dalam lingkungan tersebut sikap disiplin dan struktur organisasi sangat dijunjung tinggi.
2. Kegiatan pengawasan, kegiatan pengawasan ini merupakan kebijakan perusahaan yang dilakukan sesuai prosedur.
3. Komunikasi dan informasi, meliputi berbagai komponen seperti sistem akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan.
4. Pemantauan atau monitoring, merupakan proses penilaian kinerja karyawan yang merupakan bagian dari pengawasan.

2.1.7 Langkah-langkah Monitoring

Dalam monitoring, ada beberapa tahap atau langkah yang dilakukan agar pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pendapat Imam dan Siswandi, (2007:89- 91), proses pengawasan biasanya terdiri dari paling sedikit 5 tahap atau langkah, antara lain:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan). Tiga bentuk standar yang umum adalah:
 - a. Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
 - b. Standar-standar moneter, yang ditujukan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
 - c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:
 - a. Pengamatan (observasi).
 - b. Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis.
 - c. Metode-metode otomatis dan.
 - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern (internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran.
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan. Tindakan koreksi berupa:
 - a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
 - b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri).
 - c. Mengubah cara dalam menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Selanjutnya menurut Griffin, (2004: 167), pengawasan organisasi mempunyai 4 langkah fundamental dalam setiap prosesnya yaitu:

1. Menetapkan Standar.

2. Mengukur Kinerja.
3. Membandingkan Kinerja dengan Standar.
4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif.

2.1.8 Prinsip-prinsip Monitoring

Dalam pelaksanaan monitoring, dibutuhkan prinsi-prinsip yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan monitoring. Herujito (2001 : 242) mengemukakan bahwa terdapat 7 prinsip-prinsip dalam pengawasan, yaitu:

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat mudah dipahami.
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

Kemudian Menurut Silalahi (Suadi, 2014 : 19) menyatakan prinsip pengawasan antara lain:

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan , menilai, menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. . Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pegawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi..
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatankegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

2.1.9 Indikator Monitoring

Ketika melakukan monitoring, tentu saja ada beberapa indikator yang menjadi dasar tolak ukur berjalannya suatu monitoring. Menurut Robbins dan Coulter dalam Satriadi (2016:290) indikator pengawasan terdiri dari empat indikator yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.2 Evaluasi

32

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan kumpulan data dan informasi analitis tentang keefektifan dan efisiensi suatu bagian atau keseluruhan program (Azis, 2016:150). Lingkup evaluasi juga mencakup evaluasi pencapaian program, identifikasi dan pemecahan masalah, serta perencanaan kegiatan ke depan. Wirawan (2012) menyatakan evaluasi sebagai penelitian dimana informasi yang berguna tentang subjek evaluasi dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan indikator-indikator evaluasi dan hasilnya dituangkan dalam keputusan tentang objek evaluasi. Menurut Wrigstone (1956) Evaluasi adalah suatu proses yang ditetapkan untuk mengukur atau menaksir suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan. Evaluasi merupakan penilaian perkembangan dan progres menuju tujuan atau nilai yang dinyatakan. Menurut Magdalena dkk (2020), evaluasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis dalam menentukan nilai suatu objek melalui penilaian berdasarkan kriteria tertentu.

Evaluasi dapat dimaknai sebagai kegiatan pemberian nilai pada kualitas suatu objek evaluasi (Purwanto, 2002). Selain itu, evaluasi juga dapat dilihat sebagai suatu proses perencanaan, pengumpulan, dan penyediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk merancang alternatif keputusan. Azwar (1996) juga mendefinisikan proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis dengan membandingkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dengan hasil yang diraih. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan dan usulan untuk setiap kegiatan program. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai suatu hasil capaian dari sebuah program atau kegiatan suatu organisasi berdasarkan standar yang sebelumnya telah ditentukan.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melaksanakan fungsi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang berguna untuk keberlangsungan suatu organisasi. Tujuan dan fungsi evaluasi menurut Menurut Wirawan (2012: 22-23) adalah:

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar.
3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi.
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi.
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.
6. Akuntabilitas.
7. Memberikan saran.
8. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

2.2.3 Jenis-Jenis Evaluasi

Evaluasi tentunya mempunyai beberapa jenis, yang dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi. Menurut Wirawan (2012: 16-18) berdasarkan objeknya jenis-jenis evaluasi terdiri dari:

1. Evaluasi Kebijakan, dimana kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau

karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan yang berarti menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai suatu kebijakan yang sedang atau telah dilakukan

2. Evaluasi Program, dimana program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).
3. Evaluasi Proyek, yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek.
4. Evaluasi Material. Evaluasi material yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu.
5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM). Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau *human resources development*. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

2.2.4 Prinsip-prinsip Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti. Menurut pendapat Margono Slamet (1978:409-414), ada empat prinsip dalam kegiatan evaluasi meliputi:

1. Evaluasi harus dikaitkan dengan tujuan.
2. Evaluasi harus sah dan valid.
3. Pengambilan contoh guna kepentingan evaluasi harus representatif.
4. Hasil evaluasi harus berdaya-guna.

2.2.5 Langkah-langkah Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam menjalankannya. Notoatmodjo (2003) mengemukakan bahwa langkah-langkah evaluasi antara lain:

1. Menetapkan atau memformulasikan tujuan evaluasi, yakni apa yang akan dievaluasi terhadap kegiatan yang dievaluasi.

2. Menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan keberhasilan kegiatan yang akan dievaluasi.
3. Menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan.
4. Melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data atau hasil pelaksanaan evaluasi tersebut.
5. Menentukan keberhasilan kegiatan yang dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut serta memberikan penjelasan-penjelasan.
6. Menyusun rekomendasi atau saran-saran tindakan lebih lanjut terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

2.2.6 Indikator Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa indikator sebagai tolak ukur evaluasi tersebut. Menurut Dunn (2000:30) indikator evaluasi yaitu:

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah.
3. Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata.
4. Responsibilitas, yaitu apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka.
5. Ketetapan, yaitu apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat.

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil dari pekerjaan seorang pegawai yang dinilai melalui segi kualitas, kuantitas, waktu kerja serta kerjasama untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh organisasi (Sutrisno, 2016:172). Menurut Fahmi (2018:2) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang didasari oleh kesepakatan dan kondisi yang sebelumnya telah ditentukan, yang diukur dalam kurun waktu tertentu. Mangkunegara dalam Nurjaya dkk (2021) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kualitas dan kuantitas kerja yang diraih oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang diembannya. Menurut Edison (2016:176) kinerja juga dapat dimaknai sebagai hasil yang dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu tertentu, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun tidak mencari keuntungan.

⁷⁹ Menurut Mangkunegara (2017:67) Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dilihat dari jumlah maupun kualitas yang berhasil dicapai oleh seorang pekerja dalam menjalankan tugas yang ia miliki sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan. Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan ³ bahwa kinerja adalah hasil capaian dari suatu pekerjaan yang diukur dari proses berjalannya kerja hingga ketercapaian tujuan suatu pekerjaan.

⁴⁶ 2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Rivai dan Sagala (2013:547) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dari penilaian kinerja antara lain:

- ⁹ 1. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Karyawan membutuhkan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai suatu pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan prestasi kerja
Salah satu tujuan memberikan penilaian kinerja yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, karena semakin baik nilai prestasi yang dicapai karyawan akan mempertahankan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi dalam hal bekerja.
3. Memberikan kesempatan kerja yang adil
Penilaian kinerja akan berdampak seorang karyawan akan merasa memiliki kesempatan yang adil dalam hal mengerjakan pekerjaannya.

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

¹⁰⁴ Kinerja seseorang dalam suatu organisasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Sutrisno (2016:151), terdapat ²⁶ dua faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja antara lain:

1. Faktor Individu, meliputi:
 - a. Usaha (*effort*) yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas.
 - b. *Abilities*, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas.
 - c. *Role/ Task Perception*, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Faktor lingkungan, antara lain:
 - a. Kondisi fisik.
 - b. Peralatan.

- c. Waktu.
- d. Material.
- e. Pendidikan.
- f. Supervisi.
- g. Desain organisasi.
- h. Pelatihan.
- i. Keberuntungan.

2.3.4 Karakteristik Kinerja Yang Baik

Menurut David C. McClelland (dalam Luthans 2006), ada 6 karakteristik seseorang yang memiliki kinerja tinggi:

1. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya.
2. Berani mengambil dan menanggung risiko dalam pekerjaan.
3. Memiliki tujuan yang wajar dan masuk akal (realistis) dalam bekerja.
4. Mempunyai rencana kerja yang komprehensif dan berupaya untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.
5. Memanfaatkan feedback (umpan balik) yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.
6. Mencari kesempatan untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat.

2.3.5 Indikator Kinerja

Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Beberapa indikator untuk mengukur kinerja adalah:

1. Kualitas Kerja
Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas
Kuantitas merupakan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan. Biasanya, penilaian ini dinyatakan dalam satuan tertentu, seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu berkaitan dengan tingkat aktivitas yang diselesaikan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas
Efektivitas yaitu tingkat penggunaan sumber daya (uang, tenaga, bahan baku, teknologi) secara optimal untuk meningkatkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya tersebut.
5. Kemandirian

⁶ Indikator kemandirian mengacu pada tingkat kemampuan dan komitmen karyawan dalam menjalankan fungsi kerjanya secara bertanggung jawab.

⁵⁹ 2.4 Pemerintahan Desa

2.4.1 Pengertian Desa

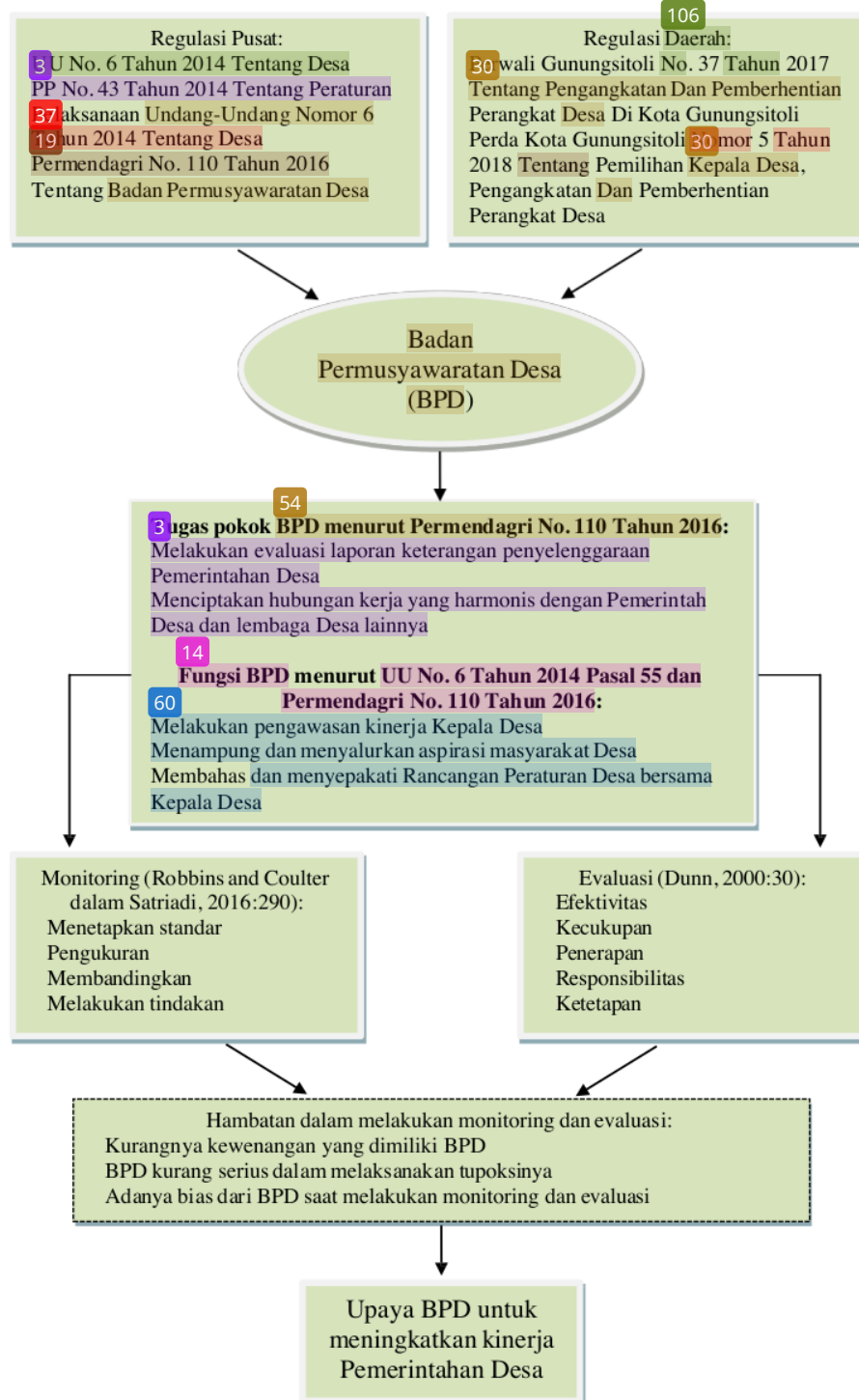
¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷ 2.4.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

⁶⁴ Menurut Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.5 Kerangka Pemikiran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung yang termuat dalam regulasi-regulasi pusat maupun regulasi-regulasi daerah. Dalam peraturan tersebut BPD memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Untuk melaksanakan tupoksinya, BPD mempunyai harus menjalankan perannya dalam segi monitoring dan evaluasi. Dari segi monitoring, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dimana monitoring memiliki indikator yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan. Sedangkan dari segi evaluasi, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana evaluasi memiliki indikator efektivitas, kecukupan, penerapan, responsibilitas, dan ketetapan. Namun dalam melaksanakan tupoksinya, BPD juga mempunyai beberapa hambatan, salah satunya yaitu anggota BPD sendiri yang kurang paham akan tupoksinya. Dengan terlaksananya peran BPD dalam monitoring dan evaluasi dengan baik, maka diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Desa.



Gambar 2.5.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	Firman, Firman	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa	2020	Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowalie sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.
Perbedaan: Penelitian akan lebih fokus pada peran BPD dalam segi Monitoring dan Evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili.				
2	Irfiani, H.N.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis	2018	Berdasarkan dari hasil penelitian dalam mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan maka diperoleh suatu penjelasan bahwa secara umum belum dilakukan dengan baik sebagaimana terlihat dari masih adanya anggota yang kurang aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, dikarenakan terkendala oleh kesibukan masing-masing anggota untuk kepentingan pribadinya, selain itu tahapan-tahapan proses evaluasi jarang dilakukan sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengetahui sejauh mana hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangampel untuk mendesak Pemerintah Desa melakukan hal tersebut.
Perbedaan: Penelitian tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili.				

3 No.	3 Nama	Judul Penelitian	Tahun Terbit	3 Hasil Penelitian
3	3 Malik, S.	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2020	3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa.
Perbedaan: Penelitian akan lebih fokus pada peran BPD dalam segi Monitoring dan Evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili.				
4	37 Mardiyah, S.A., Nurlinah	Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	2019	37 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan b 41 sesuai dengan yang diharapkan. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut.
Perbedaan: Penelitian akan lebih fokus pada peran BPD dalam segi Monitoring dan Evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili.				
5.	21 Oktasari, D., Saputra, W.A.	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2022	21 Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa belum dapat dirancang oleh Badan Permusyawaratan Desa terkendala oleh kesibukan masing-masing oleh anggota BPD serta kurangnya pemahaman terhadap pembuatan rancangan peraturan desa
Perbedaan: Penelitian akan lebih fokus pada peran BPD dalam segi Monitoring dan Evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili.				

3 No.	Nama	6 Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil Penelitian
6	Putri, M.	Pengaruh Sistem Monitoring Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bupati Jeneponto	2021	6 Sistem Monitoring Dan Pengendalian yang diterapkan pada kantor bupati Jeneponto berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada kantor bupati Jeneponto.
Perbedaan: Selain monitoring, penelitian juga akan membahas mengenai evaluasi. Penelitian dilakukan terhadap BPD di Desa Sihare'o Siwahili.				
7	6 Jaza, D., Laurensius, A.S.	Peran Badan Permasyarakatan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa	2017	67 Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa 24mpat. Pelaksanaan pengawasan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan sampai sejauhmana pula penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Perbedaan: Selain monitoring, penelitian juga akan membahas mengenai evaluasi dan kinerja. Penelitian dilakukan terhadap BPD 103 desa Sihare'o Siwahili. 34				
8	Setryaningrum, C.A., dkk	Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2019	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwapelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Plumbon sejak awal tidak berjalan dengan baik. Sekalipun telah memenuhi unsur keterwakilan namun pada proses penjaringan masyarakat yang dianggap mampu malah tidak terlibat sehingga pada akhirnya diwakilkan oleh masyarakat yang kurang mampu melaksanakan tugas dan fungsi berat Badan Permasyarakatan Desa.
Perbedaan: Penelitian akan lebih fokus pada peran BPD dalam segi Monitoring dan Evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili. 3				

3 No.	37 Nama	Judul Penelitian	Tahun Terbit	24 Hasil Penelitian
9	Sumarno	Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa	2022	Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 57 an lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas anggota BPD perlu terus diupayakan sering dinamisnya pengaturan tentang desa. Pengaturan tentang desa bisa dapat berubah begitu cepat, sesuai dengan perkembangan yang juga terjadi secara cepat.
Perbedaan: Selain monitoring, penelitian juga akan membahas mengenai evaluasi dan kinerja. Penelitian dilakukan terhadap BPD di Desa Sihare'o Siwahili.				
10	Sunarti, N.	Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa	2018	1 Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien sebagai pengawasan dan pengendalian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien juga merupakan rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi serta salah satu upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan.
Perbedaan: Selain monitoring, penelitian juga akan membahas mengenai evaluasi dan kinerja. Penelitian dilakukan terhadap BPD di Desa Sihare'o Siwahili.				

3 No.	Nama	76 Judul Penelitian	Tahun Terbit	18 Hasil Penelitian
11	Suryadi, A.	Evaluasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	2019	Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) belum maksimal mengikuti peraturan yang ada dan ditambah lagi Badan Permasyarakatan Desa belum memahami peraturan yang ada dikarenakan kurangnya pendidikan, serta sosialisasi terhadap fungsi Badan Permasyarakatan Desa dan kurangnya program pemberdayaan Badan Permasyarakatan Desa.
Perbedaan: Selain evaluasi, penelitian juga akan membahas mengenai monitoring dan kinerja. Penelitian dilakukan terhadap BPD di Desa Sihare'o Siwahili.				
12	Suryani, A.I.	Optimalisasi Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa	2020	21 Optimalisasi Peranan Badan Permasyarakatan Desa Di Bidang Pengawasan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas) melalui beberapa indikator Bidang Perencanaan, Bidang Pengorganisasian dan Bidang Pelaksanaan tidak Optimal.
Perbedaan: Selain monitoring, penelitian juga akan membahas mengenai evaluasi dan kinerja. Penelitian dilakukan terhadap BPD di Desa Sihare'o Siwahili.				
13	Uwang, A.	Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Wae Codi Kecamatan Cibabarat, Kabupaten Manggarai)	2022	7 Masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh BPD desa Wae Codi, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peran, tugas dan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; mengawasi kinerja kepala desa; serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Perbedaan: 3 Penelitian akan lebih fokus pada peran BPD dalam segi Monitoring dan Evaluasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili.				

3 No.	1 Nama	Judul Penelitian	Tahun Terbit	5 Hasil Penelitian
14	Ndraha, M.I.K., Ndraha, A.B., dkk	Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido	2022	Bentuk Komunikasi kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, yang ingin memaksakan kehendaknya untuk diikuti, sehingga regulasi atau produk yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama melainkan adanya agenda-agenda tertentu dari salah satu pihak yang ingin memaksakan agenda tersebut untuk menjadi suatu produk regulasi. Kemudian adanya ego-ego antara Perangkat Desa dan juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dikarenakan belum memberikan pemahaman yang mendalam bahwa tidak semua tertampung ide-ide tersebut dalam produk atau regulasi.
<p>Perbedaan: Penelitian akan lebih berfokus membahas tentang unsur monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD, serta dampaknya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Penelitian dilakukan terhadap BPD di Desa Sihare'o Siwahili.</p>				

Tabel 2.6.1 Penelitian Terdahulu Serta Perbedaannya Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan dekripsi dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2017:6). Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Sihahili.

10

3.2 Variabel Penelitian

Variabel menurut Hatch dan Farhady (Sugiyono, 2015: 38) adalah atribut atau sifat dan nilai dari objek yang mempunyai variasi tertentu antara satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu monitoring, evaluasi, dan kinerja.

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Monitoring Syafie (2019)	Sifat yang efektif Hal-hal yang meningkatkan efektivitas Tujuan Jenis-jenis Unsur-unsur Langkah-langkah Prinsip-prinsip	1. Menetapkan standar 2. Pengukuran 3. Membandingkan 4. Melakukan tindakan (Robbins and Coulter dalam Satriadi, 2016:290)
2	Evaluasi Magdalena dkk (2020)	Tujuan dan fungsi Jenis-jenis Prinsip-prinsip Langkah-langkah	1. Efektivitas 2. Kecukupan 3. Penerapan 4. Responsibilitas 5. Ketetapan (Sugunn, 2000:30)
3	Kinerja Nurjaya (2021)	Tujuan penilaian Faktor-faktor yang mempengaruhi Karakteristik yang baik	1. Kualitas kerja 2. Kuantitas 3. Ketepatan waktu 4. Efektivitas 5. Kemandirian (Robbins, 2016:260)

Tabel 3.2.1 Variabel Penelitian

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Sihare'o Siwahili, Jl. Fondrako K.M 3,4-5,4 Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli. Penelitian dilaksanakan selama:

Kegiatan	Jadwal																				
	April 2023		Mei 2023		Agustus 2023				Desember 2023			Februari 2024				April 2024			Juni 2024		
	2	4	1	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■																			
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing			■	■	■	■	■														
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi							■	■													
Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■							
Penulisan Naskah Skripsi														■	■						
Konsultasi Kepada Dosen Pembimbing															■	■	■				
Penulisan dan Penyempurnaan skripsi																	■	■	■		
Ujian skripsi																					■

Tabel 3.3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

3.4 ⁶ Sumber Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data yang diperoleh

peneliti berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berasal dari observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan, mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2018) informan atau narasumber adalah orang yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2018:138) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili, Ketua BPD Sihare'o Siwahili, Kepala Urusan Keuangan Desa Sihare'o Siwahili, Kepala Urusan Perencanaan Desa Sihare'o Siwahili, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili, Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Sihare'o Siwahili, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sihare'o Siwahili, Kepala Dusun I Dan II Desa Sihare'o Siwahili, serta 5 orang warga Desa Sihare'o Siwahili dengan jumlah total informan 14 orang.

No.	Nama	Jabatan
1	Satieli Zebua.	Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili
2	Sonithe Gea, S.H., M.M	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili
3	Suka Iman Zebua	Kepala Urusan Keuangan / Bendahara
4	Penyanto Zebua	Kepala Urusan Perencanaan Desa Sihare'o Siwahili
5	Ruslin Zebua	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili
6	Fatizanolu Zebua	Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Sihare'o Siwahili
7	Emanuel Zebua	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sihare'o Siwahili
8	Etikat Benihaogo Zebua	Kepala Dusun I Desa Sihare'o Siwahili
9	Terima Syukur Zebua	Kepala Dusun II Desa Sihare'o Siwahili
10	Kasieli Halawa	Warga Desa Sihare'o Siwahili
11	Hendra Situmorang	Warga Desa Sihare'o Siwahili
12	Valentina Yanitia Zebua	Warga Desa Sihare'o Siwahili
13	Dameati Telaumbanua	Warga Desa Sihare'o Siwahili
14	Elifati Zebua	Warga Desa Sihare'o Siwahili

Tabel 3.4.1 Data Informan Penelitian

5

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan bersumber dari buku, dokumen, arsip, atau catatan yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, yang sudah ada di Desa Sihare'o Siwahili yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan, mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:148). Peneliti pada penelitian ini menggunakan alat ukur untuk melakukan suatu pengukuran terhadap responden yang akan diteliti. Dalam mengamati sebuah fenomena tersebut yang disebut dengan variabel penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, setelah mendapatkan fokus penelitian yang sudah jelas maka akan dikembangkan

dengan harapan dapat membantu melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan pada saat penelitian dilakukan.

11

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013) mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam Penelitian ini, peneliti langsung datang ke tempat objek penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi nyata yang ada di Desa Sihare'o Siwahili.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan secara tatap muka dengan informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan. Dokumentasi yaitu data

yang bersumber dari buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman (1992:16). Menurut keduanya, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Tahap pertama dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data atau *data reduction*. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, survei kepuasan pelanggan, pengamatan langsung di lapangan, dan sebagainya tentu memiliki bentuk yang kompleks. Semua data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan dari data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Data yang masuk ke dalam kelompok data tidak penting kemudian aman untuk dibuang atau tidak digunakan. Sehingga tersisa data yang sifatnya penting dan kurang penting. Peneliti bisa membuang juga data kurang penting, yang kemudian hanya menyisakan data yang sifatnya penting. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan.

b. Penyajian Data

Dalam macam-macam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, setelah menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data atau *data display*. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Bentuk penyajian data kemudian beragam bisa disajikan dalam bentuk grafik, *chart*, *pictogram*, dan bentuk lain. Sehingga

kumpulan data tersebut bisa lebih mudah disampaikan kepada orang lain. Selain itu juga mengandung informasi yang jelas dan pembaca bisa dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Proses penyajian data diperlukan dalam analisis data kualitatif untuk bisa menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun dengan pola hubungan tertentu, terorganisir, dan sebagainya. Sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan suatu informasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*. Sehingga data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Yakni pada bagian kesimpulan, sehingga para pembaca laporan penelitian juga bisa menemukan kesimpulan tersebut. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun atau ditampilkan dengan memakai media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sihare'o Siwahili

4.1.1 Profil Desa Sihare'o Siwahili



Gambar 4.1.1.1 Balai Desa dan Kantor Desa Sihare'o Siwahili

Desa Sihare'o Siwahili adalah suatu daerah perdesaan yang menjadi bagian dari Kecamatan ¹⁰⁵Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 22811. Desa Sihare'o Siwahili memiliki luas wilayah 2,79km² dan secara topografis dikategorikan sebagai daerah lereng/puncak, dan mempunyai satu sungai yang mengalir dalam daerah tersebut yaitu Sungai Nou. Desa Sihare'o Siwahili terbagi atas dua dusun, mempunyai anggota BPD yang berjumlah total lima orang, dan berjarak 1km dari ibukota kecamatan. Berdasarkan pendataan terakhir pada tahun 2019, ¹⁸Desa Sihare'o Siwahili mempunyai jumlah penduduk sebanyak 812 dimana laki-laki berjumlah 403 orang dan perempuan berjumlah 409 orang. Jadi, kepadatan penduduk Desa Sihare'o Siwahili adalah 291,04 jiwa/km².

10 4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa



Gambar 4.1.2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

8 4.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

17 4.1.3.1 Kepala Desa

32 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15 a. Tugas Pokok Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi Kepala Desa

Fungsi kepala desa adalah

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

36

4.1.3.2 Sekretaris Desa

a. Tugas Pokok Sekrtaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

b. Fungsi Sekretaris Desa

Fungsi sekretaris desa antara lain:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

6

4.1.3.3 Kepala Seksi Pemerintahan

a. Tugas Pokok Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

b. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Fungsi kepala seksi pemerintahan antara lain:

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
2. Penyusunan rancangan regulasi desa.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa
4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa.
5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa.
6. Penataan dan pengelolaan wilayah.
7. Pendataan dan pengelolaan profil Desa
8. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa.
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
10. Pelayanan kepada masyarakat.
11. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
12. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.

13. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

3 4.1.3.4 Kepala Seksi Kesejahteraan

a. Tugas Pokok Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

b. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Fungsi kepala seksi kesejahteraan antara lain:

- 2** 1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa.
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa.
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya.
6. Pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

74 4.1.3.5 Kepala Seksi Pelayanan

a. Tugas Pokok Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

b. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

Fungsi kepala seksi pelayanan antara lain:

1. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan.
6. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya.
7. Pelayanan kepada masyarakat.
8. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat.
9. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
11. Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

80

4.1.3.6 Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

a. Tugas Pokok Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti:

1. Administrasi surat menyurat.
2. Arsip.

3. Ekspedisi.
4. Penataan administrasi perangkat desa.
5. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor.
6. Penyiapan rapat.
7. Pengadministrasian aset.
8. Inventarisasi.
9. Perjalanan dinas.
10. Pelayanan umum.
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

4.1.3.7 Kepala Urusan Keuangan

a. Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:

1. Pengurusan administrasi keuangan.
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

2

4.1.3.8 Kepala Urusan Perencanaan

a. Tugas Pokok Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti:

1. Menyusun rencana APBDesa.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

4.1.3.9 Kepala Dusun

a. Tugas Pokok Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

b. Fungsi Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki fungsi antara lain:

1. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya.
2. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
3. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Pelayanan kepada masyarakat.
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

31

4.1.3.10 Badan Permusyawaratan Desa

a. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa

54

Tugas BPD menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016 yaitu:

14. 1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi BPD menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 dan Permendagri

31. 110 Tahun 2016 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

29

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Kondisi Eksisting Indikator-Indikator Monitoring

40

Monitoring merupakan pengumpulan data tentang kegiatan atau program untuk diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan pemantauan yang sedang berlangsung secara terus menerus (Azis, 2016:147). Berikut adalah indikator Monitoring yang ada di Desa Sihare'o Siwahili:

a. Menetapkan standar (*Standards*)

Dalam menjalankan suatu organisasi, tentunya diperlukan suatu standar minimal yang harus dilaksanakan, dipenuhi, atau dicapai untuk memastikan hasil dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Robbins dan Coulter dalam Satriadi (2016:290), Menetapkan Standar (*Standards*) merupakan penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

47

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sonithe Gea, S.H., M.M sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 20:27 WIB di Desa Sihare' o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

“Jika kita berbicara tentang monitoring di desa, maka pihak BPD sudah menetapkan standar. Standarnya dalam artian, kita disini secara berkala melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan misalnya pembangunan, maka BPD secara berkala melakukan monitoring. Standar yang digunakan berasal dari rapat internal BPD sendiri yang telah disepakati secara bersama, dimana hasil kesepakatan itu dikoordinasikan dengan

pemerintahan desa. Sampai saat ini, BPD sudah berhasil melaksanakan standar tersebut sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Satieli Zebua sebagai Pj. Kepala Desa Sihare’o Siwahili pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 pukul 09:12 WIB dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ketika menetapkan target suatu program kegiatan *desa*, yang berperan dalam hal ini adalah seluruh bagian dari pemerintahan *desa* termasuk saya sendiri sebagai Pj. Kepala Desa, lalu perangkat-perangkat *desa*, serta BPD. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam bentuk musyawarah *desa*. Pemerintah *desa* mengundang seluruh masyarakat *desa* untuk melaksanakan musyawarah *desa* dalam penetapan usul dari kegiatan pemerintahan *desa*. Pemerintahan *desa* kemudian mejabarkan apa saja yg menjadi program-program utama kegiatan-kegiatan pemerintahan *desa* sehingga masyarakat bisa memberikan pandangan dan saran agar progres tersebut bisa tercapai. Hambatan-hambatan yang bisa muncul dari proses penetapan dan perencanaan ini contohnya adalah peraturan pemerintah dari atas yang berubah, sehingga ada program yang tidak dilaksanakan sesuai ekspektasi. Selain itu juga situasi yang tidak dapat terhindarkan misalnya munculnya wabah COVID-19 yang membuat banyak rencana harus diubah atau diundur.”

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan standar telah dilakukan dengan baik oleh BPD Sihare’o Siwahili. Selain itu, BPD Sihare’o Siwahili menetapkan standar dengan koordinasi yang baik dengan personil-personil Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

Untuk menguatkan hal tersebut, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sihare’o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, penetapan standar sudah dilakukan dengan baik, dimana setiap anggota BPD dan pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili sudah mengetahui dengan pasti standar kerja dan standar pencapaian yang mereka emban.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator menetapkan standar yaitu standar yang akan dilaksanakan oleh BPD

Sihare'o Siwahili sudah ditetapkan dengan baik dan mengikuti prosedur yang mapan dengan kerjasama yang kuat dengan Pemerintahan Desa.

b. Pengukuran (*Measurement*)

Dalam melakukan pengawasan, salah satu hal yang perlu dilakukan ialah mengukur hasil pencapaian dari objek pengawasan. Menurut Robbins dan Coulter dalam Satriadi (2016:290), Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suka Iman Zebua sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sihare'o Siwahili pada hari Selasa, 16 Januari 2024 pukul 12:05 WIB di Kantor Desa Sihare'o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

"BPD mengawasi dan mengukur program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, berdasarkan pencapaian output yang diraih."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Sonithe Gea, S.H., M.M sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 20:27 WIB di Desa Sihare' o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

"Yang mengawasi dan mengukur program kegiatan desa secara internal dalam pemerintahan desa yang pertama adalah BPD. Karena BPD adalah wadah penyambung lidah dari masyarakat. Selain BPD, yang berperan adalah pemerintah kecamatan. Dan untuk Desa Sihare'o Siwahili, yang mengawasi adalah pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Barat. Standar dalam pengukuran program kegiatan desa tentunya adalah perencanaan yang sudah dilakukan dari awal. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan, maka standar kita adalah RAB. Tentunya tingkat pencapaiannya didasari dari perencanaan itu sendiri yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Menurut saya, BPD sangat berperan penting dalam mengukur suatu program kegiatan desa, karena kemampuan masyarakat terbatas sehingga kami sebagai BPD melakukan yang terbaik dalam mewakili masyarakat. Data yang kami

peroleh sebagai BPD mengenai setiap kegiatan desa sudah jelas, baik dari perencanaan hingga pembiayaan. Dan data itu semua sudah kami miliki. Dalam mengawasi kinerja Kepala Desa yang kami perhatikan adalah pencapaian kegiatan desa itu sendiri. Pencapaian itu berdasarkan anggaran yang ada, dan juga berdasarkan waktu pelaksanaan. Kami memperhatikan terlaksananya sebuah proses atau terlaksananya mekanisme itu sendiri sesuai dengan standar yang ada.”

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran telah dilakukan dengan baik oleh BPD Sihare’o Siwahili. BPD Sihare’o Siwahili melakukan pengukuran sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan proses terlaksananya seluruh kegiatan Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

Untuk menguatkan hal tersebut, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sihare’o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengukuran sudah dilakukan dengan baik oleh BPD Sihare’o Siwahili, dimana setiap anggota BPD secara terus menerus mengawasi kegiatan serta program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator pengukuran yaitu pengukuran yang akan dilaksanakan oleh BPD Sihare’o Siwahili telah berjalan sebagaimana mestinya dengan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

c. Membandingkan (*Compare*)

Ketika hasil dari sebuah kerja telah dicapai, hasil tersebut dapat dibandingkan dengan target awal untuk melihat seberapa baik hasil yang telah tercapai. Menurut Robbins dan Coulter dalam Satriadi (2016:290), Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti⁷⁸ melakukan wawancara dengan Bapak Suka Iman Zebua sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sihare'o Siwahili⁸⁵ pada hari Selasa, 16 Januari 2024 pukul 12:05 WIB di Kantor Desa Sihare'o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

“Yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membandingkan suatu program kegiatan⁸⁴ dengan target yang telah kita tetapkan sebelumnya adalah PKP KD, dalam hal ini Kepala Desa dan diawasi oleh BPD. Dalam dua tahun terakhir, tidak ada kami temukan kesenjangan antara perencanaan program dengan hasil yang telah kami capai. Tetapi hal-hal yang berpotensi menjadi hambatan¹²⁷ saya pikir adalah situasi dan kondisi yang dapat seketika berubah, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diprediksi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Satieli Zebua sebagai Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 pukul 09:12 WIB dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk membandingkan atau melihat kesesuaian antara target perencanaan dengan kenyataan di lapangan, yang menjadi dasar utama adalah rancangan program yang sudah kami buat sebelumnya. Disitu sudah tertulis secara terperinci mulai dari waktu, kualitas, kuantitas, jumlah penerima bantuan, harga material, jumlah anggaran, dan lain-lain. Dari situ kita tinggal bandingkan dengan hasil kerja yang³⁵ capai, dan kelihatan apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membandingkan hal tersebut adalah saya sendiri sebagai Pj. Kepala Desa, diikuti oleh BPD. Untuk membandingkan hal itu alat yang biasa digunakan adalah rancangan program kegiatan, kemudian untuk alat lainnya tergantung oleh program kegiatan itu sendiri. Dalam program pembangunan salah satunya digunakan meteran untuk mengukur panjang dan luas tanah dan bangunan, dan pada program lain juga digunakan kamera sebagai alat dokumentasi. Kalau soal kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, dalam⁶⁸ tahun terakhir ini tidak ada kami temukan sama sekali.”

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal membandingkan, BPD Sihare'o Siwahili

sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. BPD Sihare'o Siwahili membandingkan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan koordinasi bersama Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

Untuk menguatkan hal tersebut, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sihare'o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, dalam hal membandingkan BPD Sihare'o Siwahili sudah menjalankannya dengan baik, dengan berpegang kuat pada perencanaan dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan tetap mengawasi kegiatan serta program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator membandingkan yaitu kegiatan membandingkan yang akan dilaksanakan oleh BPD Sihare'o Siwahili telah berjalan sebagaimana mestinya dengan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

4.2.2 Kondisi Eksisting Indikator-Indikator Evaluasi

Evaluasi dapat dipahami sebagai suatu proses merencanakan, mengumpulkan, serta menyediakan informasi yang akan dibutuhkan untuk membuat alternatif-alternatif suatu keputusan (Purwanto, 2002). Berikut adalah indikator evaluasi yang ada di Desa Sihare'o Siwahili:

a. Efektivitas

Dalam melaksanakan suatu fungsi dan pekerjaannya, setiap anggota organisasi tentunya harus mencapai hasil yang efektif dalam menyelesaikan masalah ataupun mencapai target yang telah ditetapkan. Dunn (2000:30) mendefinisikan bahwa efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sonithe Gea, S.H., M.M sebagai Ketua

Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 20:27 WIB di Desa Sihare' o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

"BPD sudah efektif dalam melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam proses kegiatan selama satu tahun anggaran kami selalu melaksanakan rapat rutin setiap triwulan. Kami selalu mengevaluasi sejauh mana pencapaian target dari program-program pemerintah desa. Dan pada akhir tahun anggaran, kami BPD bersama dengan pemerintah desa mengadakan rapat untuk mengevaluasi lagi semua program-program yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Menurut saya tidak ada hal-hal yang dapat menurunkan efektivitas BPD dalam menjalankan tupoksinya. Namun kita harus jujur bahwa kesejahteraan harus diperhatikan, dimana dalam hal ini kesejahteraan BPD dengan Pemerintah Desa ada sedikit kesenjangan yang cukup jauh. Sedangkan kalau dari segi tugas dan tanggung jawab, ya hampir mirip-mirip juga. Mungkin dari segi teknis, eksekutornya adalah pemerintah desa, tetapi pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, itu dipundak BPD. Jadi menurut saya jika ada hal yang berpotensi untuk menurunkan efektivitas BPD, maka itu adalah kesejahteraan. Selama dua tahun terakhir, kita tidak pernah membuat peraturan desa selain APBDes itu sendiri. Kita harus paham bahwa penetapan APBDes setiap tahun itu sudah merupakan peraturan desa. Sehingga jika kita berbicara mengenai peraturan desa, maka hal kita berbicara mengenai APBDes. Maka berkaitan dengan hal tersebut apakah telah mencapai hasil yang diinginkan, maka saya mengatakan sudah. Selama dua tahun terakhir Sampai detik ini, dalam tugasnya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, BPD sudah mencapai standar yang ditetapkan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Satieli Zebua sebagai Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 pukul 09:12 WIB dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

"RAB tetap disusun dengan baik untuk setiap program kegiatan desa. Dasar satuan harga barang atau jasa yang kami gunakan berpatok pada hasil survey atau SSH material. Pembiayaan yang tercantum dalam RAB selama dua tahun terakhir sudah dapat memenuhi semua biaya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam menyusun rencana kegiatan

dan RAB, yang paling utama terlibat adalah pemerintahan desa yang juga diawasi dan didampingi oleh BPD, kemudian berbagai lembaga yang ada dalam pemerintahan desa. Hasilnya kemudian akan diteruskan untuk dievaluasi oleh pemerintah kecamatan, lebih tepatnya Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Barat. Program-program desa selama dua tahun terakhir sudah semuanya terlaksana, kecuali yang dibatalkan karena adanya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah.”

17 Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BPD Sihare'o Siwahili sudah efektif dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili. BPD Sihare'o Siwahili juga telah efektif dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

Untuk menguatkan hasil wawancara ini, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sihare'o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, BPD Sihare'o Siwahili sudah efektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dimana pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili tetap diawasi dan dievaluasi secara rutin oleh BPD Sihare'o Siwahili.

23 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator efektivitas yaitu BPD Sihare'o Siwahili telah menjalankan tugasnya dengan efektif, sehingga meningkatkan kinerja dari Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili.

b. Kecukupan

Dalam mencapai hasil dan memecahkan masalah yang muncul dalam organisasi, penanganan yang dilaksanakan haruslah cukup dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dunn (2000:30) menyatakan bahwa 25 Kecukupan yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah.

47 Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Elifati Zebua sebagai warga Desa Sihare'o Siwahili pada hari Kamis, 21 Desember 2023 pukul 17:11 WIB di Desa Sihare' o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

“Sebagai warga Desa Sihare’o Siwahili, secara pribadi saya merasakan belum puas, karena hasil kerja pemerintah Desa Sihare’o Siwahili belum merata. Kalau kita perhatikan dari pembangunan, masih tidak merata. Lebih condong pembangunannya diberikan bagi masyarakat yang ada kaitan secara kekeluargaan dengan perangkat desa. Hal yang sama juga terjadi dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa, tidak merata. Malah ada bantuan yang seharusnya diberikan kepada yang kurang mampu, tetapi dialihkan pemberiannya kepada orang yang cukup mampu dan tidak layak untuk menerima bantuan. Masih juga banyak tuntutan-tuntutan lainnya dari masyarakat Desa Sihare’o Siwahili yang belum terjawab oleh pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Sonitehe Gea, S.H., M.M sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare’o Siwahili pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 20:27 WIB di Desa Sihare’ o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

“Salah satu hal yang termuat dalam APBDes yaitu mengenai masalah pembangunan atau fisik. Jika kita kaitkan kembali dengan peraturan desa, maka selama dua tahun terakhir rancangan peraturan desa telah berhasil dalam memecahkan beberapa masalah yang ada di Desa Sihare’o Siwahili. Jika kita mengatakan tidak masalah di Desa Sihare’o Siwahili, maka kita bohong. Masalah pasti ada, akan tetapi setiap masalah yang ada, tidak kita biarkan. BPD bersama pemerintah desa dan tokoh-tokoh selalu berkoordinasi dan mencari solusi untuk masalah itu. Sehingga dalam pengalaman kita selama ini, kita sudah berhasil menyelesaikan masalah melalui tindakan koreksi atau perbaikan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat atau pemerintah desa. Dalam melaksanakan perbaikan atau koreksi dalam sebuah program pemerintah desa, maka alat dasar yang kami pegang adalah rancangan program yang telah dibuat. Dalam melihat berhasil tidaknya sebuah program itu, kami mengacu pada program yang telah dibuat. Dalam melakukan tindakan koreksi, kami berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah desa. Hal ini tidak lepas dari bahan-bahan dan galian informasi yang kami dapatkan dari masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah menerima pendapat-pendapat dari para tokoh dan tentunya juga tidak terlepas dari regulasi atau aturan yang ada, maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah dan mencapai target dari program kegiatan desa

tersebut. Kalau kita melihat dari dua tahun terakhir, setiap program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa sudah tercapai semua.”

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh BPD Sihare'o Siwahili masih belum cukup untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat di Desa Sihare'o Siwahili. BPD Sihare'o Siwahili sudah melakukan usaha, tetapi masalah dalam masyarakat desa masih tetap ada.

Untuk menguatkan hasil wawancara ini, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sihare'o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, BPD Sihare'o Siwahili masih belum cukup dalam menjawab tuntutan masyarakat dan menyelesaikan semua masalah yang ada, sehingga banyak masyarakat Desa Sihare'o Siwahili yang mempunyai keluhan dari berbagai masalah yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator kecukupan yaitu BPD Sihare'o Siwahili belum cukup dalam menjawab dan menyelesaikan segala tuntutan dan masalah-masalah dari warga Desa Sihare'o Siwahili.

4.2.3 Kondisi Eksisting Indikator-Indikator Kinerja

Kinerja merupakan hasil dari proses-proses yang berdasar pada kondisi-kondisi serta kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Fahmi, 2018:2). Berikut adalah indikator kinerja yang ada di Desa Sihare'o Siwahili:

a. Kualitas Kerja

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tentu saja memiliki kualitas yang dapat diukur berdasarkan hasil yang telah dicapai. Robbins (2016:260) mengatakan bahwa kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

⁴⁷ Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Elifati Zebua sebagai warga Desa Sihare'o Siwahili pada hari Kamis, 21 Desember 2023 pukul 17:11 WIB di Desa Sihare' o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

“Salah satu hal yang kami sayangkan dari BPD dan perangkat desa adalah hasil kerja mereka yang masih tidak memuaskan. Sebagai yang memegang jabatan dalam pemerintahan desa, kami berharap bawa mereka berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tetapi saya perhatikan bahwa semua perangkat desa ini, pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena adanya ketidakadilan, tidak adanya pemerataan. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil atau produk kerja perangkat desa ini seberapa lama dapat dimanfaatkan, itu tidak bergantung pada masyarakat. Sebenarnya pemerintah desa harusnya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, mereka yang menentukan, dan hanya mereka yang bisa menjawab hal tersebut. Kalau soal pembangunan yang dilakukan di desa ini, menurut sayamasih kurang minimal. Contohnya beberapa tahun yang lalu di dusun dua, pada pembangunan jembatan penghubung antara desa dengan kebun warga di arah dusun dua. Kami perhatikan sampai sekarang ini bahwa bagian dasar jembatan itu tergerus air dan banjir, karena pada bagian bawah atau pondasi itu tidak ada diberikan batu-batu yang besar. Hanya ada batu-batu kecil sebagai penyokong jembatan itu, padahal dana yang telah disiapkan oleh pemerintah sangatlah banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Satieli Zebua sebagai Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 pukul 09:12 WIB dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut evaluasi dari saya, perangkat desa masih harus banyak mengikuti pembinaan, pelatihan, khusus untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, karena hasil dan kualitas kerja mereka terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.”

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja dari BPD Sihare'o Siwahili dan Aparat

Desa Sihare'o Siwahili masih belum cukup dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Sihare'o Siwahili.

Untuk menguatkan hasil wawancara ini, maka peneliti kembali melakukan observasi di Desa Sihare'o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kualitas kerja dari BPD dan aparat desa Sihare'o Siwahili masih belum cukup, sehingga banyak permasalahan yang timbul dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Sihare'o Siwahili akibat kurangnya kualitas kerja dari BPD dan Aparat Desa Sihare'o Siwahili.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator kualitas kerja yaitu BPD Sihare'o Siwahili memiliki kualitas kerja yang kurang baik dan dalam memastikan kelancaran seluruh program kegiatan desa yang dilaksanakan di Desa Sihare'o Siwahili, sehingga banyak keluhan yang muncul dari masyarakat Desa Sihare'o Siwahili.

b. Kuantitas

Hasil dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dapat dilihat melalui jumlah pekerjaan yang diukur berdasarkan standar tertentu. Robbins (2016:260) mendefinisikan bahwa kuantitas merupakan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan. Biasanya, penilaian ini dinyatakan dalam satuan tertentu, seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sonitehe Gea, S.H., M.M sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili pada hari Kamis, 18 Januari 2024 pukul 20:27 WIB di Desa Sihare' o Siwahili dengan hasil sebagai berikut:

"BPD lebih dominan dalam fungsi pengawasan. Kami berada dalam posisi mengawal program-program pemerintah desa yang telah disiapkan pada awal tahun agar dapat berjalan dan tercapai dalam kurun waktu satu tahun itu sendiri."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti juga mewawancarai Bapak Satieli Zebua sebagai Pj. Kepala Desa Sihare'o

Siwahili pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 pukul 09:12 WIB dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sesuai dengan tupoksi, saya wajib membuat rencana kerja baik itu perbulan, persemester, ataupun setahun. Uraian tugas saya secara umum adalah untuk memimpin, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Saya menargetkan agar pelaksanaan kerja yang saya selesaikan dapat mencapai seratus persen. Setelah itu saya laporkan persentase penyelesaian program kerja saya kepada Pemerintah Kecamatan. secara berkala. Selama dua tahun terakhir, semua capaian pekerjaan saya sudah mencapai hasil target yang maksimal yaitu seratus persen.”

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kuantitas kerja yang dilaksanakan oleh BPD Sihare’o Siwahili dan Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili sudah cukup baik. BPD Sihare’o Siwahili berperan dalam mengawasi kuantitas kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

Untuk menguatkan hal tersebut, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sihare’o Siwahili. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kuantitas kerja BPD Sihare’o Siwahili sudah baik, dimana setiap anggota-anggota BPD Sihare’o Siwahili mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari indikator kuantitas yaitu kuantitas kerja yang akan dilaksanakan oleh BPD Sihare’o Siwahili sudah cukup, sehingga dalam menjalankan tugasnya pada bidang monitoring dan evaluasi BPD Sihare’o Siwahili telah berhasil meningkatkan kuantitas kerja Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili.

4.2.4 Keterkaitan Antar Indikator-Indikator

1. Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Efektivitas dan Kualitas Kerja

BPD telah menetapkan standar tertentu pada saat memonitoring pelaksanaan berbagai macam kegiatan dalam Desa Sihare'o Siwahili. Standar ini ditetapkan melalui rapat internal BPD sendiri, kemudian BPD berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dan disepakati bersama. Standar inilah yang digunakan dalam menilai berjalannya program-program desa seperti pembangunan. Monitoring yang dilakukan oleh BPD berperan besar dalam meningkatkan efektivitas khususnya dalam segi kualitas kerja para perencana dan pelaksana program-program desa, termasuk juga Kepala Desa dan perangkat desa.

2. Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Efektivitas dan Kuantitas

Standar yang telah ditetapkan oleh BPD dalam pelaksanaan tugasnya dalam bidang monitoring telah berjalan dengan baik dan efektif. BPD secara rutin mengadakan rapat dan mengevaluasi kembali program-program desa serta memantau progres kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program desa khususnya dalam memastikan kuantitas kerja yang terlaksana telah mencapai target dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

3. Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Kecukupan dan Kualitas Kerja

Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh BPD dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program-program pemerintahan desa, demi memastikan kualitas kerja yang baik. Tetapi masyarakat menilai bahwa kualitas kerja dan hasil yang telah dicapai oleh BPD masih belum cukup, sehingga menyebabkan

banyaknya masyarakat desa yang memiliki keluhan terhadap kinerja BPD.

4. Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Kecukupan dan Kuantitas

Standar ⁶² yang telah ditetapkan oleh BPD dalam tugasnya pada bidang monitoring sudah dilaksanakan oleh BPD dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan sudah cukup mampu dalam memecahkan berbagai masalah dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintahan desa dan berperan untuk meningkatkan kuantitas kerja personil pemerintahan desa.

5. Kaitan Indikator Pengukuran dengan Efektivitas dan Kualitas Kerja

Pengukuran dilaksanakan oleh BPD dalam rangka memantau dan mengukur seluruh pembangunan, pembiayaan, pembedayaan, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan desa lainnya secara internal dan sesuai dengan RAB dan perencanaan yang dilaksanakan sebelumnya. Hal ini telah berhasil dalam meningkatkan dan memberi pengaruh positif terhadap efektivitas dan kualitas kerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

6. Kaitan Indikator Pengukuran dengan Efektivitas dan Kuantitas

Pengukuran telah dilaksanakan oleh BPD untuk memantau berjalannya pembedayaan, pembiayaan, pembangunan, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan desa lainnya secara internal dan sesuai dengan RAB dan perencanaan yang dilaksanakan sebelumnya. Hal ini memiliki dampak dalam meningkatkan efektivitas serta kuantitas kerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

7. Kaitan Indikator Pengukuran dengan Kecukupan dan Kualitas Kerja

Pengukuran dilaksanakan oleh BPD dalam rangka memantau dan mengukur seluruh pembangunan, pembiayaan, pembedayaan, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan desa lainnya secara internal dan sesuai dengan RAB dan perencanaan yang dilaksanakan sebelumnya. Namun masyarakat desa menilai bahwa hal ini masih ¹²⁵ belum memuaskan dan belum sesuai dengan harapan masyarakat dalam menjawab keluhan mereka, sehingga banyak masyarakat desa merasa bahwa kualitas kerja dan hasil kerja BPD masih belum cukup.

8. Kaitan Indikator Pengukuran dengan Kecukupan dan Kuantitas

Pengukuran dilaksanakan oleh BPD dalam rangka memantau dan mengukur seluruh pembangunan, pembiayaan, pembedayaan, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan desa lainnya secara internal dan sesuai dengan RAB dan perencanaan yang dilaksanakan sebelumnya. Hal ini telah cukup dalam meningkatkan hasil kerja serta kuantitas kerja dari pemerintahan desa.

9. Kaitan Indikator Membandingkan dengan Efektivitas dan Kualitas Kerja

BPD menggunakan rancangan program ⁵⁰ yang telah dibuat sebelumnya dalam membandingkan serta melihat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang diinginkan, dimana disitu telah tertera segala hal seperti jumlah anggaran, penerima bantuan, waktu, harga material, kualitas, dan seterusnya. Hal ini memberi pengaruh positif terhadap pemerintahan desa dalam meningkatkan efektifitas dan juga kualitas kerja yang dicapai oleh pemerintahan desa.

10. Kaitan Indikator Membandingkan dengan Efektivitas dan Kuantitas

BPD menggunakan rancangan program ⁵⁰ yang telah dibuat sebelumnya dalam membandingkan serta melihat kesesuaian antara hasil

yang dicapai dengan target yang diinginkan, dimana disitu telah tertera segala hal seperti jumlah anggaran, penerima bantuan, waktu, harga meterial, kualitas, dan seterusnya. Dengan BPD melaksanakan monitoring dan membandingkan hasil kerja pemerintahan desa secara terus menerus, maka efektivitas kerja pemerintahan desa meningkat dan kuantitas kerja pemerintahan desa terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan.

11. Kaitan Indikator Membandingkan dengan Kecukupan dan Kualitas Kerja

BPD menggunakan rancangan program yang telah dibuat sebelumnya dalam membandingkan serta melihat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang diinginkan, dimana disitu telah tertera segala hal seperti jumlah anggaran, penerima bantuan, waktu, harga meterial, kualitas, dan seterusnya. Meskipun demikian, masyarakat desa menilai bahwa peran BPD masih belum maksimal, dan merasa bahwa kualitas dan hasil kerja BPD masih belum cukup dan belum terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat desa.

12. Kaitan Indikator Membandingkan dengan Kecukupan dan Kuantitas

BPD menggunakan rancangan program yang telah dibuat sebelumnya dalam membandingkan serta melihat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang diinginkan, dimana disitu telah tertera segala hal seperti jumlah anggaran, penerima bantuan, waktu, harga meterial, kualitas, dan seterusnya. Dengan BPD yang melakukan perbandingan secara rutin antara perencanaan dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka kuantitas kerja pemerintahan desa dapat berjalan dengan cukup baik, dan sesuai dengan jumlah yang direncanakan.

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan hubungan antara peran BPD dalam monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja

Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili, dengan penekanan pada apakah kaitan yang telah dipaparkan diatas mendukung ataupun menghambat peran BPD dalam monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa. BPD memiliki peran yang besar dalam memastikan bahwa segala kegiatan desa berjalan dengan baik,. Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana peran BPD dalam monitoring dan evaluasi berdampak pada kinerja Pemerintahan Desa, tabel berikut ini akan memberikan data empiris yang menggambarkan hal tersebut.

No.	Kaitan	Hasil (Pendukung/ Penghambat)
1.	Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Efektivitas dan Kualitas Kerja	Pendukung
2.	Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Efektivitas dan Kuantitas	Pendukung
3.	Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Kecukupan dan Kualitas Kerja	Penghambat
4.	Kaitan Indikator Menetapkan Standar dengan Kecukupan dan Kuantitas	Pendukung
5.	Kaitan Indikator Pengukuran dengan Efektivitas dan Kualitas Kerja	Pendukung
6.	Kaitan Indikator Pengukuran dengan Efektivitas dan Kuantitas	Pendukung
7.	Kaitan Indikator Pengukuran dengan Kecukupan dan Kualitas Kerja	Penghambat
8.	Kaitan Indikator Pengukuran dengan Kecukupan dan Kuantitas	Pendukung
9.	Kaitan Indikator Membandingkan dengan Efektivitas dan Kualitas Kerja	Pendukung
10.	Kaitan Indikator Membandingkan dengan Efektivitas dan Kuantitas	Pendukung
11.	Kaitan Indikator Membandingkan dengan Kecukupan dan	Penghambat

	Kualitas Kerja	
12.	Kaitan Indikator Membandingkan dengan Kecukupan dan Kuantitas	Pendukung

Tabel 4.2.4.1 Kaitan Peran BPD Peran **BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi** Untuk Meningkatkan **Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili**

4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran **BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi** Untuk Meningkatkan **Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili**

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh BPD dalam peran BPD dalam monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa Sihare'o Siwahili, diantaranya adalah:

1. Kurangnya Kesejahteraan BPD
Honorarium yang diterima oleh BPD masih kurang karena belum cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota BPD. Hal ini berdampak pada kurangnya keseriusan BPD dalam menjalankan tupoksinya dan menyebabkan kinerja BPD tidak optimal karena anggota BPD mengalihkan fokusnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Kurangnya Kewenangan BPD Dalam Mengambil Keputusan
Fungsi BPD dalam monitoring dan evaluasi tidak dapat dipungkiri, tetapi pada akhirnya, BPD tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terakhir terkait berbagai kebijakan dan program-program desa. Dalam menjalankan fungsinya, BPD masih memiliki atasan yaitu inspektorat. Selain itu, meskipun BPD memiliki saran atau masukan mengenai program dan kegiatan desa, yang menentukan apakah program itu akan dilaksanakan atau tidak adalah pemerintah kecamatan, sehingga tidak semua saran dan masukan diberikan oleh BPD dapat terealisasikan.
3. Adanya Bias Dari BPD Saat Melakukan Monitoring Dan Evaluasi
Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili yaitu Bapak Satieli Zebua juga menjabat sebagai Sekretaris BPD Sihare'o Siwahilli. Hal ini tentunya menyebabkan bias dimana salah satu anggota BPD yang memiliki tugas untuk memonitor dan mengevaluasi Pj. Kepala Desa adalah Pj. Kepala Desa itu sendiri.

4.4 Upaya BPD ⁶⁵ Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili

BPD memiliki berbagai tugas dan fungsi dalam memastikan berjalannya suatu pemerintahan desa. BPD secara struktural adalah lembaga yang berdiri sejajar dengan Kepala Desa. Dalam melaksanakan tupoksinya pada bidang monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa Sihare'o Siwahili, BPD Sihare'o Siwahili melakukan berbagai upaya-upaya diantaranya adalah:

1. Memastikan Kejelasan Standar Yang Digunakan

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, standar yang digunakan haruslah jelas. Dalam hal ini BPD Sihare'o Siwahili telah berupaya untuk mendapatkan data yang jelas dari pemerintah desa. Dalam tupoksinya pada bidang monitoring dan evaluasi, standar yang digunakan oleh BPD berpedoman pada perencanaan program-program desa serta keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat berupa APBDes, rancangan program dan kegiatan desa, dan lain-lain.

2. Berkoordinasi Secara Terus Menerus Dengan Pemerintah Desa

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program oleh pemerintahan desa, tidak segalanya berjalan dengan mulus. Terkadang muncul masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. BPD yang mengawasi berjalannya program-program tersebut segera melakukan tindakan perbaikan atau koreksi untuk memecahkan masalah yang muncul. Dalam hal ini, BPD Sihare'o Siwahili bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintahan desa untuk memecahkan masalah tersebut secepat mungkin.

3. Selalu Terlibat Erat Dalam Proses Perencanaan Dan Pengevaluasian Yang Dilaksanakan Dalam Pemerintahan Desa

BPD Sihare'o Siwahili memiliki inisiatif yang sangat baik dalam keterlibatannya dalam setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. BPD Sihare'o Siwahili selalu hadir dan aktif dalam setiap perencanaan program serta kegiatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam proses kegiatan selama satu tahun anggaran BPD selalu melaksanakan rapat rutin setiap triwulan. BPD selalu mengevaluasi sejauh mana pencapaian

target dari program-program pemerintah desa, dan pada akhir tahun anggaran, BPD bersama dengan pemerintah desa mengadakan rapat untuk mengevaluasi lagi semua program-program yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ⁷¹Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili ⁷⁷memiliki peran yang penting dalam hal monitoring dan evaluasi. BPD harus ⁷⁷mengawasi berjalannya pemerintahan desa beserta seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan melakukan evaluasi ⁷⁷penyelenggaraan pemerintahan desa secara rutin. Hal ini berperan penting dan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa.
2. ³Dibawah ini adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat BPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa Sihare'o Siwahili:
 - a. Kurangnya kesejahteraan BPD.
 - b. Kurangnya kewenangan BPD dalam mengambil keputusan.
 - c. Adanya bias dari BPD saat melakukan monitoring dan evaluasi.
3. BPD telah melakukan berbagai upaya dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili, antara lain:
 - a. Memastikan kejelasan standar yang digunakan.
 - b. Berkoordinasi secara terus menerus dengan pemerintah desa.
 - c. Selalu terlibat erat dalam proses perencanaan dan pengevaluasian yang dilaksanakan dalam pemerintahan desa.

11 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memiliki saran yaitu:

1. BPD Sihare'o Siwahili sebaiknya lebih terbuka pada masyarakat desa dalam perannya pada bidang monitoring dan evaluasi. Masih banyak masyarakat desa yang merasakan bahwa peran BPD masih minim dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pemerintahan. BPD harus menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat desa, karena BPD berfungsi sebagai perwakilan dari masyarakat desa.
2. BPD Sihare'o Siwahili harus meminimalisir bias yang terjadi ketika melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam kasus ini, Sekretaris BPD seharusnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pj. Kepala Desa karena dapat menyebabkan bias dalam mengawasi dan mengevaluasi Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili. Selain itu, kesejahteraan BPD juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, karena anggota-anggota BPD akan kurang optimal dalam pekerjaannya jika tingkat kesejahteraannya rendah.
3. BPD Sihare'o Siwahili sudah berupaya dalam monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa Sihare'o Siwahili. Namun BPD harus lebih memperhatikan ketepatan waktu dari personil-personil pemerintahan desa Sihare'o Siwahili, terutama ketepatan waktu keluar masuk kantor dan ketepatan waktu penyelesaian kerja. BPD juga harus berupaya untuk lebih memperhatikan masukan dan saran dari masyarakat desa Sihare'o Siwahili terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa Sihare'o Siwahili.

Selain itu, peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam topik peran BPD dalam monitoring dan evaluasi yang lebih beragam, dimana masih ada ruang untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya pada hal yang memiliki keterkaitan dengan dampak kontribusi serta keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- Firman, Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Sengkang*, 23(1).
- Herlina, A. (2018). Pengaruh Dimensi Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan. *Economics Bosowa Journal*, 4(4).
- Irfiani, H.N. (2018). Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5(4).
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Mardiyah, S.A., Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2).
- Ndraha, M.I.K., Ndraha, A.B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido. *Jurnal EMBA*, 10(4).
- Oktasari, D., Saputra, W.A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kybernan (Ilmu Pemerintahan)*, 1(1).
- Putri, M. (2021). Pengaruh Sistem Monitoring Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bupati Jenepono.
- Roza, D., Laurensius, A.S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Setryaningrum, C.A., dkk. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).

- Sumarno. (2022). Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Widya Praja*, 2(1).
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2).
- Suryadi, A. (2019). Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Suryani, A.I. (2020). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa. *PAsira: Journal of Public Administration Musi Raya*, 3(1).
- Uwang, A., dkk. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1).

Regulasi Pemerintah:

- Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

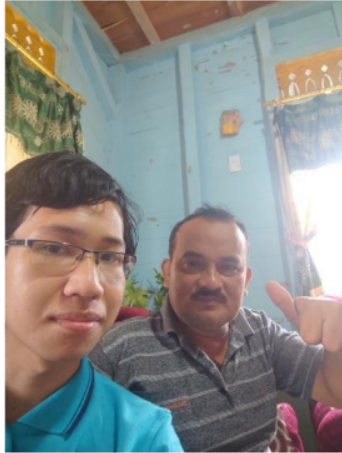
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kota Gunungsitoli.

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Gunungsitoli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3
LAMPIRAN

Wawancara dengan Pj. Kepala Desa
Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Kepala Urusan
Perencanaan Desa Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Kepala Seksi
Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Ketua BPD Sihare'o
Siwahili



Wawancara dengan Kepala Seksi
Kemasyarakatan Desa Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Kepala Urusan
Keuangan Desa Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Kepala Seksi
Kesejahteraan Desa Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Warga Desa Sihare'o
Siwahili



Wawancara dengan Kepala Dusun I Desa
Sihare'o Siwahili



Wawancara dengan Kepala Dusun II Desa
Sihare'o Siwahili



DRAF WAWANCARA

Dalam wawancara ini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, dimana pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Peran BPD Dalam Monitoring Dan Evaluasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili”. Yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah Pj. Kepala Desa Sihare’o Siwahili, Ketua BPD Sihare’o Siwahili, Kepala Urusan Keuangan Desa Sihare’o Siwahili, Kepala Urusan Perencanaan Desa Sihare’o Siwahili, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sihare’o Siwahili, Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Sihare’o Siwahili, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sihare’o Siwahili, Kepala Dusun I Dan II Desa Sihare’o Siwahili, serta 5 orang warga Desa Sihare’o Siwahili dengan jumlah total informan 14 orang.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pj. Kepala Desa Sihare’o Siwahili

1. Menetapkan standar
 - a. Dalam program kegiatan desa, siapa saja yang bertugas dalam menetapkan target program kegiatan itu?
 - b. Bagaimana pengaruh serta peran masyarakat desa dalam penetapan suatu target program kegiatan desa?
 - c. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menetapkan suatu target program kegiatan desa?
2. Membandingkan
 - a. Bagaimana proses yang dilakukan ketika membandingkan hasil capaian program desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?
 - b. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membandingkan hasil dari program kegiatan desa dengan target yang telah ditetapkan?
 - c. Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?
 - d. Selama dua tahun terakhir, apakah ada kesenjangan antara target suatu program desa dengan standar yang ditetapkan sebelumnya?
3. Melakukan tindakan
 - a. Apakah dilakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi jika misalnya terjadi penyimpangan antara target dengan hasil program kegiatan desa?
 - b. Siapa saja yang berperan dalam mengoreksi hal tersebut?
 - c. Seberapa sering dilakukan koreksi jika terjadi kesenjangan antara target dan hasil program kegiatan desa?

- d. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan ketika melakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi dalam program kegiatan desa?
4. Efektivitas (Evaluasi)
 - a. Dari program kegiatan desa selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai semua target yang ditetapkan?
 5. Kecukupan
 - a. Apakah rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir telah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah di Desa Sihare'o Siwahili?
 6. Kualitas kerja
 - a. Apakah aparat desa memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang tugas yang diembannya?
 7. Kuantitas
 - a. Apakah bapak sebagai Pj. Kepala Desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai Pj. Kepala Desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai Pj. Kepala Desa?
 - d. Apakah bapak sebagai Pj. Kepala Desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Camat?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
 8. Ketepatan waktu
 - a. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?
 - b. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
 - c. Tindakan apa bapak lakukan sebagai Pj. Kepala Desa bila ada personil bapak yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu?
 - d. Bagaimana cara bapak sebagai Pj. Kepala Desa dalam mengorganisir pelaksanaan tugas aparat desa sehingga mereka memiliki motivasi dalam mengerjakan tugas dan beban kerjanya masing-masing?
 - e. Kapan saja bapak sebagai Pj. Kepala Desa mengevaluasi capaian kerja aparat desa untuk bahan pembinaan dan menilai hasil output nya?
 9. Efektivitas (Kinerja)
 - a. Dalam menyusun program kegiatan desa, apakah tetap dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan?
 - b. Apa yang menjadi dasar penetapan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan?
 - c. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?
 - d. Pihak mana saja yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibuat pemerintah desa?
 - e. Selama dua tahun terakhir, adakah program desa yang tak bisa diselesaikan? Mengapa?

10. Kemandirian
 - a. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?
 - d. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili

1. Menetapkan standar
 - a. Apakah sudah ditetapkan standar bagi BPD dalam melakukan kegiatan monitoring di desa? Jika sudah, jelaskan apa saja yang menjadi standar tersebut.
 - b. Apakah standar tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh anggota BPD Desa Sihare'o Siwahili?
2. Pengukuran
 - a. Siapa saja yang mengawasi dan mengukur program kegiatan desa?
 - b. Apa saja yang menjadi standar dalam pengukuran suatu program kegiatan desa?
 - c. Seberapa dalam peran BPD dalam pengukuran suatu program kegiatan desa?
 - d. Apakah sudah jelas data yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan terhadap program kegiatan desa, baik itu dari segi mutu maupun jumlah hasil?
 - e. Apa saja yang diperhatikan oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi dan mengukur kinerja Kepala Desa?
3. Membandingkan
 - a. Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?
4. Melakukan tindakan
 - a. Ketika dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi pada suatu program kegiatan desa yang mengalami penyimpangan, apa saja peran yang dimiliki oleh BPD?
5. Efektivitas (Evaluasi)
 - a. Apakah BPD sudah efektif dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
 - b. Apa saja hal-hal yang bisa ataupun berpotensi untuk menurunkan efektivitas BPD dalam menjalankan tupoksinya?
 - c. Dari rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai hasil yang diinginkan?
 - d. Dalam tugasnya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, apakah BPD telah mencapai standar atau target yang ditetapkan?
6. Kecukupan
 - a. Apakah rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir telah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah di Desa Sihare'o Siwahili?

- b. Jika dalam sebuah program kegiatan desa terjadi kesenjangan atau masalah, kemudian dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi, apakah koreksi yang dilakukan mampu menyelesaikan masalah tersebut?
 - c. Bagaimana cara BPD melakukan koreksi atas rancangan program yang disusun pemerintah desa agar sesuai aturan yang ada?
 - d. Jika suatu program banyak yang tidak terlaksana sesuai rencana karena kesalahan pengelola kegiatan, apa tindakan dari BPD?
7. Ketetapan
 - a. Bagaimana hasil audit keuangan desa oleh inspektorat, sudahkah sesuai dengan aturan penggunaan yang ditetapkan?
 8. Kuantitas
 - a. Berapa item uraian tugas bapak sebagai anggota BPD pada bidang tugas yang bapak emban?
 9. Efektivitas (Kinerja)
 - a. Pihak mana saja yang terlibat dalam menyusun **rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan** yang dibuat pemerintah desa?

Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa Sihare'o Siwahili

1. Menetapkan standar
 - a. Dalam program kegiatan desa, siapa saja yang bertugas dalam menetapkan target program kegiatan itu?
 - b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menetapkan suatu target program kegiatan desa?
2. Pengukuran
 - a. Siapa saja yang mengawasi dan mengukur program kegiatan desa?
 - b. Apa saja yang menjadi standar dalam pengukuran suatu program kegiatan desa?
3. Membandingkan
 - a. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membandingkan hasil dari program kegiatan desa dengan target yang telah ditetapkan?
 - b. Selama dua tahun terakhir, apakah ada kesenjangan antara target suatu program desa dengan standar yang ditetapkan sebelumnya?
 - c. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?
4. Melakukan tindakan
 - a. Apakah dilakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi jika misalnya **jadi penyimpangan antara target dengan hasil program kegiatan desa?**
 - b. **Apa saja kendala-kendala yang ditemukan ketika melakukan** suatu tindakan perbaikan atau koreksi dalam program kegiatan desa?
5. Efektivitas (Evaluasi)
 - a. Dari rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai hasil yang diinginkan?
 - b. Dari program kegiatan desa selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai semua target yang ditetapkan?
6. Penerapan
 - a. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan pada warga yang telah ditetapkan sebagai penerima?

- b. Jenis bantuan apa saja yang diberikan pemerintah desa kepada warga atau kelompok masyarakat desa?
 - c. Bagaimana menghitung bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa dengan jenis bantuan yang berbeda agar tidak terjadi timpang tindih?
7. Responsibilitas
 - a. Apa saja reaksi yang diberikan masyarakat desa pada saat menerima bantuan dari pemerintah desa?
 - b. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?
 8. Ketetapan
 - a. Bagaimana hasil audit keuangan desa oleh inspektorat, sudahkah sesuai dengan aturan penggunaan yang ditetapkan?
 9. Kualitas kerja
 - a. Bagaimanakah tingkat disiplin kerja aparat desa setiap harinya, apakah sudah baik atau belum?
 10. Kuantitas
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
 11. Ketepatan waktu
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
 12. Efektivitas (Kinerja)
 - a. Dalam menyusun program kegiatan desa, apakah tetap dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) iatan?
 - b. Apa yang menjadi dasar penetapan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan?
 - c. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?
 - d. Pihak mana saja yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibuat pemerintah desa?
 13. Kemandirian
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?

- d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?
- e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

Kepala Urusan Perencanaan Desa Sihare'o Siwahili

1. Menetapkan standar
 - a. Dalam program kegiatan desa, siapa saja yang bertugas dalam menetapkan target program kegiatan itu?
2. Kuantitas
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
3. Ketepatan waktu
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
4. Efektivitas (Kinerja)
 - a. Apa yang menjadi dasar penetapan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan?
 - b. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?
5. Kemandirian
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?
 - e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili

1. Membandingkan
 - a. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?

2. **Responsibilitas**
 - a. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?
3. **Kuantitas**
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
4. **Ketepatan waktu**
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
5. **Kemandirian**
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?
 - e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Sihare'o Siwahili

1. **Responsibilitas**
 - a. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah desa?
2. **Ketetapan**
 - a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan?
3. **Kuantitas**
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?

- d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
4. Ketepatan waktu
- a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
5. Kemandirian
- a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?
 - e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sihare'o Siwahili

1. Responsibilitas
- a. Bagaimana menilai bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu berdaya guna?
 - b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah desa?
2. Ketetapan
- a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan?
 - b. Bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatan, tergolong baik atau buruk?
 - c. Apakah ada diantara masyarakat desa yang mengalami malnutrisi?
3. Kuantitas
- a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
4. Ketepatan waktu

- a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?
- b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
- 5. Efektivitas (Kinerja)
 - a. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?
 - b. Selama dua tahun terakhir, adakah program desa yang tak bisa diselesaikan? Mengapa?
- 6. Kemandirian
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?
 - e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

Kepala Dusun I Dan II Desa Sihare'o Siwahili

- 1. Membandingkan
 - a. Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?
 - b. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?
- 2. Responsibilitas
 - a. Apa saja reaksi yang diberikan masyarakat desa pada saat menerima bantuan dari pemerintah desa?
 - b. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?
- 3. Kuantitas
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?
 - b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?
 - c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?
 - e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
- 4. Ketepatan waktu
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?

- b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
- 6. Kemandirian
 - a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?
 - b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?
 - c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?
 - d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?
 - e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

Warga Desa Sihare'o Siwahili

- 1. Kecukupan
 - a. Apakah program kegiatan desa yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir telah berhasil menjawab tuntutan kepentingan masyarakat desa?
- 2. Responsibilitas
 - a. Setelah menerima bantuan dari pemerintah desa, apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa merasa puas?
 - b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan pemerintah desa tersebut?
- 3. Ketetapan
 - a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan?
 - b. Apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja telah meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa?
- 4. Kualitas kerja
 - a. Apakah hasil kerja dari BPD dan aparat desa cukup memuaskan atau tidak?
 - b. Berapa lama produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
 - c. Apakah program kerja yang dikerjakan oleh BPD dan aparat desa sudah bermutu tinggi?

HASIL WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Satieli Zebua
Jabatan : Pj. Kepala Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 3 Februari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Menetapkan Standar	<ol style="list-style-type: none">Dalam program kegiatan desa, siapa saja yang bertugas dalam menetapkan target program kegiatan itu?Bagaimana pengaruh serta peran masyarakat desa dalam penetapan suatu target program kegiatan desa?Apa saja yang menjadi hambatan dalam menetapkan suatu target program kegiatan desa?
Membandingkan	<ol style="list-style-type: none">Bagaimana proses yang dilakukan ketika membandingkan hasil capaian program desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membandingkan hasil dari program kegiatan desa dengan target yang telah ditetapkan?Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?Selama dua tahun terakhir, apakah ada kesenjangan antara target suatu program desa dengan standar yang ditetapkan sebelumnya?
Melakukan Tindakan	<ol style="list-style-type: none">Apakah dilakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi jika misalnya terjadi penyimpangan antara target dengan hasil program kegiatan desa?Siapa saja yang berperan dalam mengoreksi hal tersebut?Seberapa sering dilakukan koreksi jika terjadi kesenjangan antara target dan hasil program kegiatan desa?Apa saja kendala-kendala yang ditemukan ketika melakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi dalam program kegiatan desa?

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Efektivitas	a. Dari program kegiatan desa selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai semua target yang ditetapkan?
Kecukupan	a. Apakah rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir telah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah di Desa Sihare'o Siwahili?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	a. Apakah aparat desa memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang tugas yang diembannya?
Kuantitas	<p>a. Apakah bapak sebagai Pj. Kepala Desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?</p> <p>b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai Pj. Kepala Desa pada bidang tugas yang bapak emban?</p> <p>c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai Pj. Kepala Desa?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai Pj. Kepala Desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Camat?</p> <p>e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?</p>
Ketepatan waktu	<p>a. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?</p> <p>c. Tindakan apa bapak lakukan sebagai Pj. Kepala Desa bila ada personil bapak yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu?</p> <p>d. Bagaimana cara bapak sebagai Pj. Kepala Desa dalam mengorganisir pelaksanaan tugas aparat desa sehingga mereka memiliki motivasi dalam mengerjakan tugas dan beban kerjanya masing-masing?</p> <p>e. Kapan saja bapak sebagai Pj. Kepala Desa mengevaluasi capaian kerja aparat desa untuk bahan pembinaan dan menilai hasil output nya?</p>
Efektivitas	a. Dalam menyusun program kegiatan desa, apakah tetap dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB)

	<p>kegiatan?</p> <p>b. Apa yang menjadi dasar penetapan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan?</p> <p>c. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?</p> <p>d. Apakah mana saja yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibuat pemerintah desa?</p> <p>e. Selama dua tahun terakhir, adakah program desa yang tak bisa diselesaikan? Mengapa?</p>
Kemandirian	<p>a. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?</p> <p>c. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil pemerintahan desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?</p>

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara
Menetapkan Standar	<p>18 etika menetapkan target suatu program kegiatan desa, yang berperan dalam hal ini adalah seluruh bagian dari 82 erintahan desa termasuk saya sendiri sebagai Pj. Kepala Desa, lalu perangkat-perangkat desa, serta BPD. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam bentuk musyawarah desa. Pemerintah desa mengundang seluruh masyarakat desa untuk melaksanakan musyawarah desa dalam penetapan usul dari kegiatan pemerintahan desa. Pemerintahan desa kemudian mejabarkan apa saja yg menjadi program-program utama kegiatan-kegiatan pemerintahan desa sehingga masyarakat bisa memberikan pandangan dan saran agar progres tersebut bisa tercapai. Hambatan-hambatan yang bisa muncul dari proses penetapan dan perencanaan ini contohnya adalah peraturan pemerintah dari atas yang berubah, sehingga ada program yang tidak</p>

	<p>dilaksanakan sesuai ekspektasi. Selain itu juga situasi yang tidak dapat terhindarkan misalnya munculnya wabah COVID-19 yang membuat banyak rencana harus diubah atau diundur.”</p>
Membandingkan	<p>“Untuk membandingkan atau melihat kesesuaian antara target perencanaan dengan kenyataan di lapangan, yang menjadi dasar utama adalah rancangan program yang sudah kami buat sebelumnya. Disitu sudah tertulis secara terperinci mulai dari waktu, kualitas, kuantitas, jumlah penerima bantuan, harga material, jumlah anggaran, dan lain-lain. Dari situ kita tinggal bandingkan dengan hasil kerja yang tercapai, dan kelih³⁵ apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membandingkan hal tersebut adalah saya sendiri sebagai Pj. Kepala Desa, diikuti oleh BPD. Untuk membandingkan hal itu alat yang biasa digunakan adalah rancangan program kegiatan, kemudian untuk alat lainnya tergantung oleh program kegiatan itu sendiri. Dalam program pembangunan salah satunya digunakan meteran untuk mengukur panjang dan luas tanah dan bangunan, dan pada program lain juga digunakan kamera sebagai alat dokumentasi. Kalau soal kesenjangan⁶⁸ antara perencanaan dan pelaksanaan, dalam dua tahun terakhir ini tidak ada kami temukan sama sekali.”</p>
Melakukan Tindakan	<p>“Jika misalnya ada hasil kerja yang tidak sesuai target, maka kami akan meninjau dan mengevaluasi kembali program itu. Disini yang berperan adalah pengawas termasuk saya, serta pelaksana program desa tersebut, dalam hal memperbaiki atau mengoreksi pekerjaan yang tidak sesuai dengan target. Jika saya mendapat informasi bahwa ada ketidak sesuaian, saya melihat, memeriksa, dan mempertanyakan kepada perangkat desa atau pelaksana kegiatan supaya diperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas tersebut. Bilamana tidak bisa dia perbaiki maka saya berkoordinasi dengan BPD dan juga pemerintah kecamatan untuk memberikan sanksi kepada perangkat desa tersebut sebagai tahap awal peringatan dalam pelaksanaan tugasnya. Tindakan koreksi dilakukan terhadap setiap kesenjangan atau jika kelakuan perangkat desa tidak ada perbaikan atau perubahan ataupun tidak ada niat memperbaiki kembali pekerjaannya. Adalah suatu pekerjaan bagi saya Pj. Kepala Desa untuk terus mengoreksi</p>

pekerjaan perangkat desa tersebut setiap saat. Dalam hal ini yang dapat menjadi kendala yaitu perlunya waktu dan tenaga yang lebih baik dari pengawas maupun pelaksana program desa tersebut.”

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Efektivitas	“Kalau kita berbicara dua tahun terakhir, maka banyak program kegiatan yang targetnya telah tercapai, namun ada sebagian yang berubah karena adanya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan dari atas.”
Kecukupan	16 <i>PBDes adalah satu-satunya yang tergolong peraturan desa yang telah kami buat dalam dua tahun terakhir. Selama ini program-program yang termuat dalam APBDes sudah dapat memecahkan masalah yang muncul di Desa Sihare’o Siwahili.</i> ”

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	“Menurut evaluasi dari saya, perangkat desa masih harus banyak mengikuti pembinaan, pelatihan, khusus untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, karena hasil dan kualitas kerja mereka terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.”
Kuantitas	“Sesuai dengan tupoksi, saya wajib membuat rencana kerja baik itu perbulan, persemester, ataupun pertahun. Uraian 12 <i>as saya secara umum adalah untuk memimpin, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Saya menargetkan agar pelaksanaan kerja yang saya selesaikan dapat mencapai seratus persen. Setelah itu saya laporkan persentase penyelesaian program kerja saya kepada Pemerintah Kecamatan. secara berkala. Selama dua tahun terakhir, semua capaian pekerjaan saya sudah mencapai hasil target yang maksimal yaitu seratus persen.</i> ”
Ketepatan waktu	“Sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai Pj. Kepala Desa, saya wajib untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada saya secara rutin dalam rentang waktu tertentu, serta membuat laporan secara rutin juga secara berkala sesuai aturan. Bila ada personil aparat desa yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, maka hal yang saya lakukan adalah memberikan teguran, dan memberikan waktu

	<p>yg tertentu untuk mereka menyelesaikannya. Bilamana hal itu tidak dapat mereka dilaksanakan, maka teguran akan saya diberikan kepada perangkat desa tersebut. Jika masih saja tidak terlaksana maka teguran terakhir saya berikan dengan koordinasi bersama camat untuk perangkat desa tersebut, supaya direkomendasikan untuk diberhentikan. Cara saya mengorganisir bawahan saya aparat desa yaitu dengan terus mengadakan pertemuan dengan perangkat desa dan saya memberikan saran-saran sebelum mereka melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing. Terkadang dalam melaksanakan tugas, karena SDM atau kemampuan perangkat desa tidak sama, dan ada perangkat desa yang kerjanya tidak sesuai dengan perencanaan serta progres kerjanya tidak tepat waktu. Maka dari itu beberapa tugas dari perangkat desa tersebut saya alihkan kepada perangkat desa lain. Saya mengevaluasi capaian kerja aparat desa setiap 3 bulan sekali, dan mengadakan evaluasi akhir tiap tahunnya.”</p>
Efektivitas	<p>“RAB tetap disusun dengan baik untuk setiap program kegiatan desa. Dasar satuan harga barang atau jasa yang kami gunakan berpatok pada hasil survey atau SSH material. Pembiayaan yang tercantum dalam RAB selama dua tahun terakhir sudah dapat memenuhi semua biaya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam menyusun rencana kegiatan dan RAB, yang paling utama terlibat adalah pemerintahan desa yang juga diawasi dan didampingi oleh BPD, kemudian berbagai lembaga yang ada dalam pemerintahan desa. Hasilnya kemudian akan diteruskan untuk dievaluasi oleh pemerintah kecamatan, lebih tepatnya Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Barat. Program-program desa selama dua tahun terakhir sudah semuanya terlaksana, kecuali yang dibatalkan karena adanya peraturan-p⁸¹aturan baru yang dikeluarkan pemerintah.”</p>
Kemandirian	<p>“Saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pj. Kepala Desa tetap berkomitmen kuat, tepat waktu, bertanggung jawab, dan tentunya menguasai dengan penuh tugas-tugas yang dibebankan kepada saya.”</p>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sonitehe Gea, S.H., M.M
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 18 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Menetapkan Standar	a. Apakah sudah ditetapkan standar bagi BPD dalam melakukan kegiatan monitoring di desa? Jika sudah, jelaskan apa saja yang menjadi standar tersebut. b. Apakah standar tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh anggota BPD Desa Sihare'o Siwahili?
Pengukuran	a. Siapa saja yang mengawasi dan mengukur program kegiatan desa? b. Apa saja yang menjadi standar dalam pengukuran suatu program kegiatan desa? c. Seberapa dalam peran BPD dalam pengukuran suatu program kegiatan desa? d. Apakah sudah jelas data yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan terhadap program kegiatan desa, baik itu dari segi mutu maupun jumlah hasil? e. Apa saja yang diperhatikan oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi dan mengukur kinerja Kepala Desa?
Membandingkan	a. Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya?
Melakukan Tindakan	a. Ketika dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi pada suatu program kegiatan desa yang mengalami penyimpangan, apa saja peran yang dimiliki oleh BPD?

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan 10
Efektivitas	a. Apakah BPD sudah efektif dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa? b. Apa saja hal-hal yang bisa ataupun berpotensi

	<p>untuk menurunkan efektivitas BPD dalam menjalankan tupoksinya?</p> <p>c. Dari rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai hasil yang diinginkan?</p> <p>d. Dalam tugasnya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, apakah BPD telah mencapai standar atau target yang ditetapkan?</p>
Kecukupan	<p>a. Apakah rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir telah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah di Desa Sihare'o Sihahili?</p> <p>b. Jika dalam sebuah program kegiatan desa terjadi kesenjangan atau masalah, kemudian dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi, apakah koreksi yang dilakukan mampu menyelesaikan masalah tersebut?</p> <p>c. Bagaimana cara BPD melakukan koreksi atas rancangan program yang disusun pemerintah desa agar sesuai aturan yang ada?</p> <p>d. Jika suatu program banyak yang tidak terlaksana sesuai rencana karena kesalahan pengelola kegiatan, apa tindakan dari BPD?</p>
Ketetapan	<p>a. Bagaimana hasil audit keuangan desa oleh inspektorat, sudahkah sesuai dengan aturan penggunaan yang ditetapkan?</p>

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Berapa item uraian tugas bapak sebagai anggota BPD pada bidang tugas yang bapak emban?
Efektivitas	a. 12 ak mana saja yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibuat pemerintah desa?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara
Menetapkan Standar	<i>"Jika kita berbicara tentang monitoring di desa, maka pihak BPD sudah menetapkan standar. Standarnya dalam artian, kita disini secara berkala melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan misalnya</i>

	<p>pembangunan, maka BPD secara berkala melakukan monitoring. Standar yang digunakan berasal dari rapat internal BPD sendiri yang telah disepakati secara bersama, dimana hasil kesepakatan itu dikoordinasikan dengan pemerintahan desa. Sampai saat ini, BPD sudah berhasil melaksanakan standar tersebut sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan sebelumnya.”</p>
Pengukuran	<p>“Yang mengawasi dan mengukur program kegiatan desa secara internal dalam pemerintahan desa yang pertama adalah BPD. Karena BPD adalah wadah penyambung lidah dari masyarakat. Selain BPD, yang berperan adalah pemerintah kecamatan. Dan untuk Desa Sihare’o Siwahili, yang mengawasi adalah pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Barat. Standar dalam pengukuran program kegiatan desa tentunya adalah perencanaan yang sudah dilakukan dari awal. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan, maka standar kita adalah RAB. Tentunya tingkat pencapaiannya didasari dari perencanaan itu sendiri yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Menurut saya, BPD sangat berperan penting dalam mengukur suatu program kegiatan desa, karena kemampuan masyarakat terbatas sehingga kami sebagai BPD melakukan yang terbaik dalam mewakili masyarakat. Data yang kami peroleh sebagai BPD mengenai setiap kegiatan desa sudah jelas, baik dari perencanaan hingga pembiayaan. Dan data itu semua sudah kami miliki. Dalam mengawasi kinerja Kepala Desa yang kami perhatikan adalah pencapaian kegiatan desa itu sendiri. Pencapaian itu berdasarkan anggaran yang ada, dan juga berdasarkan waktu pelaksanaan. Kami memperhatikan terlaksananya sebuah proses atau terlaksananya mekanisme itu sendiri sesuai dengan standar yang ada.”</p>
Membandingkan	<p>“Mengenai alat, tentunya kami menggunakan data yang ada. Dalam hal ini tentunya yaitu rencana program kegiatan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa itu sendiri, dan juga hitungan-hitungan teknis dimana kegiatan itu sifatnya berhubungan dengan uang.”</p>
Melakukan Tindakan	<p>“Kalau mengenai penyimpangan, saya berani mengatakan selama saya menjabat sebagai Ketua BPD kurang lebih tiga tahun, sampai saat ini penyimpangan belum pernah kita temukan. Akan tetapi mungkin dalam prosesnya itu ada keterlambatan, ada masalah di lapangan, atau tidak</p>

sesuai dengan yang sudah diprogramkan, hal itu bisa terjadi. Dalam hal itu, peran BPD yaitu terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, dimana kita membangun komunikasi dan mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Setelah itu maka kita akan mencari solusinya. Selama saya menjabat penyimpangan belum pernah saya temukan. Masalah mungkin ada, tetapi secara prinsip masalah itu bisa kita selesaikan antara BPD bersama dengan Pemerintahan Desa.”

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Efektivitas	<p>“BPD sudah efektif dalam melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam proses kegiatan selama satu tahun anggaran kami selalu melaksanakan rapat rutin setiap triwulan. Kami selalu mengevaluasi sejauh mana pencapaian target dari program-program pemerintah desa. Dan pada akhir tahun anggaran, kami BPD bersama dengan pemerintah desa mengadakan rapat untuk mengevaluasi lagi semua program-program yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Menurut saya tidak ada hal-hal yang dapat menurunkan efektivitas BPD dalam menjalankan tupoksinya. Namun kita harus jujur bahwa kesejahteraan harus diperhatikan, dimana dalam hal ini kesejahteraan BPD dengan Pemerintah Desa ada sedikit kesenjangan yang cukup jauh. Sedangkan kalau dari segi tugas dan tanggung jawab, ya hampir mirip-mirip juga. Mungkin dari segi teknis, eksekutornya adalah pemerintah desa, tetapi pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, itu dipundak BPD. Jadi menurut saya jika ada hal yang berpotensi untuk menurunkan efektivitas BPD, maka itu adalah kesejahteraan. Selama dua tahun terakhir, kita tidak pernah membuat peraturan desa selain APBDes itu sendiri. Kita harus paham bahwa penetapan APBDes setiap tahun itu sudah merupakan peraturan desa. Sehingga jika kita berbicara mengenai peraturan desa, maka hal kita berbicara mengenai APBDes. Maka berkaitan dengan hal tersebut apakah telah mencapai hasil yang diinginkan, maka saya mengatakan sudah. Selama dua ta⁶² terakhir Sampai detik ini, dalam tugasnya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, BPD sudah mencapai standar yang ditetapkan.”</p>

Kecukupan	<p>“Salah satu hal yang termuat dalam APBDes yaitu mengenai masalah pembangunan atau fisik. Jika kita kaitkan kembali dengan peraturan desa, maka selama dua tahun terakhir rancangan peraturan desa telah berhasil dalam memecahkan beberapa masalah yang ada di Desa Sihare’o Siwahili. Jika kita mengatakan tidak masalah di Desa Sihare’o Siwahili, maka kita bohong. Masalah pasti ada, akan tetapi setiap masalah yang ada, tidak kita biarkan. BPD bersama pemerintah desa dan tokoh-tokoh selalu berkoordinasi dan mencari solusi untuk masalah itu. Sehingga dalam pengalaman kita selama ini, kita sudah berhasil menyelesaikan masalah melalui tindakan koreksi atau perbaikan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat atau pemerintah desa. Dalam melaksanakan perbaikan atau koreksi dalam sebuah program pemerintah desa, maka alat dasar yang kami pegang adalah rancangan program yang telah dibuat. Dalam melihat berhasil tidaknya sebuah program itu, kami mengacu pada program yang telah dibuat. Dalam melakukan tindakan koreksi, kami berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah desa. Hal ini tidak lepas dari bahan-bahan dan galian informasi yang kami dapatkan dari masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah menerima pendapat-pendapat dari para tokoh dan tentunya juga tidak terlepas dari regulasi atau aturan yang ada, maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah dan mencapai target dari program kegiatan desa tersebut. Kalau kita melihat dari dua tahun terakhir, setiap program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa sudah tercapai semua.”</p>
Ketetapan	<p>“Dari hasil audit inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa dalam dua tahun terakhir ini, sampai detik ini tidak ada ditemukan penyalahgunaan dan penggunaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Baik dari informasi pemerintah desa, ataupun ketika inspektorat turun ke lapangan dimana BPD biasanya diundang untuk sama-sama menyaksikan. Dari proses itu semua, jika saya mengambil sampel dua tahun terakhir, sampai sekarang ini tidak ada temuan.”</p>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kuantitas	<p>“BPD lebih dominan dalam fungsi pengawasan. Kami berada dalam posisi mengawal program-program</p>

	<i>pemerintah desa yang telah disiapkan pada awal tahun agar dapat berjalan dan tercapai dalam kurun waktu satu tahun itu sendiri.”</i>
Efektivitas	<i>“Yang terlibat paling utama dalam menyusun rencana kegiatan dan RAB adalah pemerintahan desa itu sendiri, kemudian kami dari BPD, lalu lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan desa yang juga didampingi pendamping dari desa. Dimana pada akhir semua proses itu nantinya dievaluasi oleh pemerintah kecamatan, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Barat.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Suka Iman Zebua
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 16 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Menetapkan Standar	a. Dalam program kegiatan desa, siapa saja yang bertugas dalam menetapkan target program kegiatan itu? b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menetapkan suatu target program kegiatan desa?
Pengukuran	a. Siapa saja yang mengawasi dan mengukur program kegiatan desa? b. Apa saja yang menjadi standar dalam pengukuran suatu program kegiatan desa?
Membandingkan	a. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membandingkan hasil dari program kegiatan desa dengan target yang telah ditetapkan? b. Selama dua tahun terakhir, apakah ada kesenjangan antara target suatu program desa dengan standar yang ditetapkan sebelumnya? c. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?
Melakukan Tindakan	a. Apakah dilakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi jika misalnya terjadi penyimpangan antara target dengan hasil program kegiatan desa? b. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan ketika melakukan suatu tindakan perbaikan atau koreksi dalam program kegiatan desa?

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Efektivitas	a. Dari rancangan peraturan desa yang dibuat selama dua tahun terakhir, apakah telah mencapai hasil yang diinginkan? b. Dari program kegiatan desa selama dua tahun terakhir, apakah telah
Penerapan	a. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan pada warga yang telah ditetapkan sebagai penerima? b. Jenis bantuan apa saja yang diberikan pemerintah

	<p>desa kepada warga atau kelompok masyarakat desa?</p> <p>c. Bagaimana menghitung bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa dengan jenis bantuan yang berbeda agar tidak terjadi timpang tindih?</p>
Responsibilitas	<p>a. Apa saja reaksi yang diberikan masyarakat desa pada saat menerima bantuan dari pemerintah desa?</p> <p>b. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?</p>
Ketetapan	<p>a. Bagaimana hasil audit keuangan desa oleh inspektorat, sudahkah sesuai dengan aturan penggunaan yang ditetapkan?</p>

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	<p>a. Bagaimanakah tingkat disiplin kerja aparat desa setiap harinya, apakah sudah baik atau belum?</p>
Kuantitas	<p>a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan?</p> <p>b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban?</p> <p>c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa?</p> <p>e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?</p>
Ketepatan Waktu	<p>a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?</p>
Efektivitas	<p>a. Dalam menyusun program kegiatan desa, apakah tetap dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan?</p> <p>b. Apa yang menjadi dasar penetapan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan?</p> <p>c. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya</p>

	kegiatan sesuai rencana? d. 12. Tak mana saja yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibuat pemerintah desa?
--	---

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara
Menetapkan Standar	<i>“Dalam penetapan standar dan target dari suatu program kegiatan desa, yang berperan dalam hal itu adalah pemerintah desa berdasarkan hasil dari musyawarah dusun dan telah disetujui oleh BPD. Dalam melakukan hal ini, ada beberapa hal yang menjadi halangan, misalnya situasi-situasi yang tidak bisa dihindari seperti wabah COVID-19 dan juga peraturan-peraturan yang bisa seketika berubah”</i>
Pengukuran	<i>“BPD mengawasi dan mengukur program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, berdasarkan pencapaian output yang diraih.”</i>
Membandingkan	<i>“Yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membandingkan suatu program kegiatan desa dengan target yang telah kita tetapkan sebelumnya adalah PKP KD, dalam hal ini Kepala Desa dan diawasi oleh BPD. Dalam dua tahun terakhir, tidak ada kami temukan kesenjangan antara perencanaan program dengan hasil yang telah kami capai. Tetapi hal-hal yang berpotensi menjadi hambatan saya pikir adalah situasi dan kondisi yang dapat seketika berubah, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diprediksi.”</i>
Melakukan Tindakan	<i>“Ketika terjadi ketidaksesuaian antara target dengan hasil program kegiatan desa maka akan dilakukan evaluasi kembali untuk melihat sumbernya. Dalam proses memperbaiki hal ini, maka tentunya dibutuhkan ruang dan waktu lebih, serta tindakan ekstra dari pengawas dan pelaksana program kegiatan desa”</i>

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Efektivitas	<i>“Selama dua tahun terakhir, rancangan peraturan desa yang telah dibuat telah mencapai hasil yang diinginkan, sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam program kegiatan desa,</i>

	<i>ada yang berhasil tercapai dan ada juga sebagian yang tidak.”</i>
Penerapan	<i>“Pemberian bantuan yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan petunjuk aturan yang berlaku. Salah satu bantuan yang telah kami diberikan kepada masyarakat desa adalah berupa bibit serta alat-alat pertanian. Agar tidak terjadi kesalahan, maka bantuan yang kami berikan akan dihitung dan disesuaikan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam penerapannya diawasi oleh BPD.”</i>
Responsibilitas	<i>“Tempat penyaluran bantuan kepada masyarakat desa kami sesuaikan tergantung dengan jenis bantuan yang diberikan. Ketika masyarakat menerima bantuan, reaksi yang kami mendapatkan reaksi yang positif, namun sebagian ada yang bersifat kritis akan hal tersebut.”</i>
Ketetapan	<i>“Selama ini hasil dari audit keuangan desa oleh inspektorat kecamatan dinilai wajar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	<i>“Para aparat desa memiliki disiplin kerja yang baik dan konsisten.”</i>
Kuantitas	<i>“Saya sebagai Kaur Keuangan diwajibkan untuk membuat rencana kerja baik itu rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan. Secara garis besar, uraian tugas saya yang terpenting adalah satu yaitu untuk mengurus segala hal yang bersangkutan dengan bidang keuangan dalam pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugas saya, target minimal dari program kerja saya yang saya selesaikan adalah 85%, dan persentase program kerja yang telah saya laksanakan itu wajib untuk saya laporkan kepada Kepala Desa. Untuk hasil penyelesaian kerja saya selama dua tahun terakhir, saya telah berhasil menyelesaikan 90% dari target capaian.”</i>
Ketepatan Waktu	<i>“Dalam melaksanakan tugas saya, saya diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu tertentu, baik itu perhari, perbulan, ataupun pertahun. Kemudian dari hasil kerja saya tersebut saya wajib membuat capaian progres kerja baik itu mingguan, bulanan, dan tahunan.”</i>
Efektivitas	<i>“RAB tetap dibuat dalam setiap penyusunan program kegiatan desa. Pemerintahan Desa dan BPD selalu terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dan RAB.”</i>

	<i>Dalam menetapkan harga barang yang dibelanjakan dalam anggaran, kami berpatok pada hasil survey atau SSH material. Selama ini dana yang disiapkan dalam perencanaan telah dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai dengan rencana.”</i>
Kemandirian	<i>“Dalam menjalankan tugas saya sebagai Kaur Keuangan, saya memiliki komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya selalu tepat waktu, bertanggung jawab, serta menguasai tugas yang saya laksanakan. Meskipun tidak diawasi oleh pimpinan, saya selalu bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai Kaur Keuangan.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Penyanto Zebua
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Menetapkan Standar	a. Dalam program kegiatan desa, siapa saja yang bertugas dalam menetapkan target program kegiatan itu?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan? b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban? c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa? e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
Ketepatan Waktu	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan? b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
Efektivitas	a. Apa yang menjadi dasar penetapan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan? b. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?
Kemandirian	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa

	<p>mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?</p> <p>c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?</p> <p>e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?</p>
--	---

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara
Menetapkan Standar	<p>“Dalam menetapkan program kegiatan desa, tentunya dimulai dari perencanaan. Dalam hal ini yang berperan adalah pemerintahan desa itu sendiri yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, kemudian BPD. Ada juga unsur-unsur lembaga, baik dari PKK, LPM, Karang Taruna. Ada juga unsur-unsur yang lain, misalnya dalam bidang kesehatan dari kader-kader posyandu, kemudian ada juga PPKBB. Kemudian ada juga kelompok-kelompok misalnya Tribina dan juga PIK-R. Dan tentunya secara umum seluruh masyarakat desa juga ikut berperan dalam hal ini, tetapi sangat disayangkan partisipasi masyarakat desa masih kurang dalam menghadiri rapat atau musyawarah desa.</p>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kuantitas	<p>“Sebagai Kepala Urusan Keuangan, saya diwajibkan untuk membuat rencana kerja bulanan, semester, juga 17 unan. Dalam bidang tugas yang saya emban, ada beberapa bidang. Ada bidang pelaksanaan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan desa. Dalam melaksanakan tugas saya saya targetkan minimal sembilan puluh persen. Jumlah persentase program kerja saya itu akan saya</p>

	<p>laporkan pada Kepala Desa dalam setiap bulan dalam rapat awal bulan. Disitu dilaporkan sejauh mana progres kerja, apa saja masalah atau kendala yang dihadapi, dan target kerja apa saja yang sudah tercapai sehingga Kepala Desa dapat mengambil sikap jika misalnya ada kendala. Dalam dua tahun terakhir, capaian kerja saya mencapai seratus persen.”</p>
Ketepatan Waktu	<p>“Sebagai bagian tupoksi dan pekerjaan saya, saya diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam jangka waktu tertentu baik perhari, perminggu, maupun perbulan. Begitu juga dengan pembuatan capaian progres kerja, saya diwajibkan untuk membuatnya baik itu mingguan, bulanan, dan tahunan.”</p>
Efektivitas	<p>“Yang menjadi dasar pen¹²apan harga satuan barang dan jasa yang dibeli dari dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan adalah peraturan walikota yang setiap tahun dikeluarkan. Kalau mengenai apakah pembiayaan yang ada dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana, itu tergantung. Ketika pencapaian output tidak sesuai dengan target, itu dipengaruhi oleh situasi dilapangan karena yang kita berdayakan ini adalah masyarakat desa. Tentu kita ketahui bahwa masing-masing warga masyarakat desa ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, dana desa sebenarnya hanya untuk kegiatan pemberdayaan. Dimana untuk mencapai target pembangunan, pekerja itu tentu diupah. Kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin kurang kuat atau kurang memadai untuk bekerja, mereka akan mekmaksakan dirinya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga terkadang dari segi pencapaian, nilai targetnya tidak sesuai perencanaan dan pembiayaan. Tetapi ada juga kegiatan-kegiatan lain terutama yang non-fisik, itu tercapai.”</p>
Kemandirian	<p>“Dalam menjalankan tugas saya, saya memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab, dan menguasai tugas-tugas yang saya emban, walaupun saya tidak selalu tepat waktu keluar masuk kantor. Namun, saya tetap bekerja seperti biasanya sekalipun tidak diawasi oleh pimpinan.”</p>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ruslin Zebua
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 16 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Membandingkan	a. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Responsibilitas	a. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan? b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban? c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa? e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
Ketepatan Waktu	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan? b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
Kemandirian	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa

	<p>mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?</p> <p>c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?</p> <p>e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?</p>
--	---

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara
Membandingkan	<i>“Salah satu yang dapat menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar adalah ketika dalam pelaksanaannya berbenturan dengan peraturan yang berlaku.”</i>

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Responsibilitas	<i>“Tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat itu tergantung dari petunjuk pemerintah dan sasaran bantuan.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kuantitas	<i>“Saya selalu membuat rencana kerja baik itu perbulan, persemester, dan pertahun. Untuk tugas yang saya laksanakan saya ada berjumlah empat. Target saya dalam penyelesaian perogram kegiatan desa adalah seratus persen, meskipun dalam dua tahun terakhir masih belum mencapai target hasil maksimum. Persentase hasil kerja saya tersebut kemudian saya laporkan kepada Kepala Desa, yang dimuat dalam LPJ.”</i>
Ketepatan Waktu	<i>“Saya diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Capaian progres kerja tersebut kemudian saya muat dalam capaian progres</i>

	<i>kerja mingguan, bulanan, dan tahunan.”</i>
Kemandirian	<i>“Dalam menjalankan tugas saya, saya memiliki komitmen yang baik, selalu tepat waktu, dan juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya laksanakan. Saya menguasai tugas yang saya emban dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Saya juga tetap melaksanakan pekerjaan saya meskipun tanpa diawasi.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Fatizanolu Zebua
Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Sihare'o
Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 11 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Responsibilitas	a. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah desa?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan? b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban? c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa? e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
Ketepatan Waktu	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan? b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
Kemandirian	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?

	<p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?</p> <p>c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?</p> <p>e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?</p>
--	--

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Responsibilitas	<i>"Dengan adanya bantuan dari pemerintahan desa, saya melihat bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa."</i>
Ketetapan	<i>"Masyarakat penerima bantuan ada yang meningkat taraf hidupnya, meskipun tidak seratus persen."</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kuantitas	<i>"Saya sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan diharuskan untuk membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan. Tugas saya dalam bidang kemasyarakatan ada dua, yaitu pemberdayaan dan pembinaan, tetapi secara keseluruhan masih banyak hal-hal lain yang saya kerjakan. Target minimal saya dalam menyelesaikan rencana program kerja adalah seratus persen, dimana persentase program kerja yang telah saya laksanakan itu akan saya laporkan kepada Kepala Desa secara berkala. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian kerja yang saya laksanakan sudah mencapai seratus persen."</i>
Ketepatan Waktu	<i>"Saya diwajibkan dalam tupoksi saya untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam jangka waktu tertentu, dan juga melaporkan capaian progres kerja saya dalam jangka waktu tertentu."</i>
Kemandirian	<i>"Dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya, saya berkomitmen kuat, tepat waktu, sangat bertanggung jawab, serta menguasai tugas-tugas yang saya emban dimana saya didampingi oleh pendamping. Saya juga"</i>

	<i>tetap bekerja meskipun tidak sedang diawasi, karena saya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan kepada saya.”</i>
--	---

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Emanuel Zebua
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 11 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Responsibilitas	a. Bagaimana menilai bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu berdaya guna? b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah desa?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan? b. Bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatan, tergolong baik atau buruk? c. Apakah ada diantara masyarakat desa yang mengalami malnutrisi?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan? b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban? c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa? e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
Ketepatan Waktu	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan perbulan? b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib

	membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
Efektivitas	<p>a. Setelah dibuat RAB kegiatan, apakah pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi biaya kegiatan sesuai rencana?</p> <p>b. Selama dua tahun terakhir, adakah program desa yang tak bisa diselesaikan? Mengapa?</p>
Kemandirian	<p>a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?</p> <p>c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?</p> <p>e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?</p>

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Responsibilitas	<i>“Saya memantau sendiri bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa sudah berdaya guna. Dengan bantuan dari pemerintah desa, terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.”</i>
Ketetapan	<i>“Dengan menerima bantuan dari pemerintah desa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak tercapai, sehingga taraf hidup mereka meningkat. Melalui personil-personil yang bergerak dalam bidang kesehatan, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara bertahap pada masyarakat dan hasilnya sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa orang diantara masyarakat khususnya di kalangan anak-anak yang mengalami malnutrisi.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara

Kuantitas	<p>“Dalam melaksanakan tugas saya, saya diwajibkan untuk membuat rencana kerja baik itu bulanan, semester, ataupun tahunan. Tugas-tugas yang saya laksanakan ada beberapa item sekitar tujuh hingga sepuluh tergantung kegiatan desa yang sedang berjalan. Saya menargetkan persentase program kerja dalam satu tahun dapat saya selesaikan seratus persen, dan target itu sudah tercapai selama dua tahun terakhir. Persentase itulah yang kemudian saya laporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa.”</p>
Ketepatan Waktu	<p>“Sebagai salah seorang aparat desa, saya memenuhi apapun pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan dan harus saya pertanggungjawabkan agar selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian saya akan capaian progres kerja baik itu perminggu, perbulan, ataupun pertahun.”</p>
Efektivitas	<p>“Sejauh ini pembiayaan yang tercantum dalam RAB dapat memenuhi keperluan kegiatan desa yang telah direncanakan. Selama dua tahun terakhir dalam pekerjaan yang saya laksanakan, sudah tercapai semua. Namun ada juga yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.”</p>
Kemandirian	<p>“Saya pikir komitmen adalah suatu hal yang wajib untuk saya miliki dalam memberi pelayanan pada masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas, saya selalu tepat waktu keluar masuk kantor, bertanggung jawab penuh, menguasai tugas-tugas saya, dan siap bekerja meskipun tidak sedang diawasi.”</p>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Etikak Benihaogo Zebua
Jabatan : Kepala Dusun I Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Membandingkan	a. Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya? b. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Responsibilitas	a. Apa saja reaksi yang diberikan masyarakat desa pada saat menerima bantuan dari pemerintah desa? b. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan? b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban? c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa? e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
Ketepatan Waktu	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan

	<p>perbulan?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?</p>
Kemandirian	<p>a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat?</p> <p>b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja?</p> <p>c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban?</p> <p>d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan?</p> <p>e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?</p>

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara 119
Membandingkan	<p><i>“Dalam program kegiatan desa, alat-alat yang kami gunakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya dalam bagian pertanian, ketika ada masyarakat desa yang mengeluh bahwa aliran air tidak mencapai daerah pertanian, maka kami akan menggunakan alat-alat pompanisasi yang kemudian diberikan kepada para pengguna melalui kelompok, dan mereka yang akan menggunakan alat-alat tersebut dalam berbagai kelompok, khususnya oleh warga Desa Sihare’o Siwahili. Hal yang dapat menyebabkan target tidak sesuai dengan program yang direncanakan adalah apabila ditengah pelaksanaannya terjadi bencana atau kejadian-kejadian yang tidak terduga, sehingga apa yang tercapai agak menyimpang dari apa yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Maka dari itu kita kategorikan ke bagian bencana atau sesuatu yang urgent, sehingga apa yang sedang dilaksanakan itu di pending, dan akan kembali dilaksanakan pada program-program kegiatan selanjutnya.”</i></p>

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Responsibilitas	<p>“Reaksi masyarakat adalah antusias ketika menerima bantuan dari pemerintah desa, walaupun masih ada yang pro dan kontra, meskipun sebelumnya sudah kita bahas dalam forum musyawarah desa. Ini dikarenakan program-program tersebut merupakan program yang ditentukan dan ditetapkan sebelumnya oleh atasan kami yaitu pemerintah kota. Bantuan kepada masyarakat tersebut kami salurkan di kantor desa ataupun di balai desa.”</p>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kuantitas	<p>“Kami membuat rencana kerja baik bulanan, semester, dan tahunan. Tugas saya biasanya ada satu item sebagai kepala dusun, tetapi dapat bertambah menjadi dua atau tiga item tergantung program kegiatan desa yang sedang berjalan. Dalam merencanakan program kerja, kami biasanya menargetkan seratus persen dapat terselesaikan. Persentase penyelesaian kerja tersebut akan saya laporkan kepada kepala desa baik yang sudah selesai ataupun yang belum. Hal ini dilakukan sekali sebulan sebagai bentuk evaluasi. Dalam dua tahun terakhir, saya tidak bisa mengatakan bahwa sudah seratus persen semua tercapai.”</p>
Ketepatan Waktu	<p>“Saya diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja, naik itu perhari, perminggu, maupun perbulan. Jumlah beban kerja tersebut juga bergantung dari apa saja tugas administrasi yang diberikan kepada saya. Capaian progres kerja itu wajib saya buat, dan dilaporkan baik secara lisan maupun secara tulisan dalam rentang waktu yang telah ditentukan.”</p>
Kemandirian	<p>“Saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat juga dapat menerimanya dengan senang hati. Saya masuk dan keluar kantor sesuai dengan jadwal yang sama dengan perangkat desa lain. Kami masuk pukul delapan pagi dan pulang pukul lima sore. Dalam melaksanakan tugas saya, saya bertanggung jawab penuh, menguasai tugas-tugas saya, dan tetap bekerja sesuai tupoksi walaupun tidak sedang diawasi oleh pimpinan.”</p>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Terima Syukur Zebua
Jabatan : Kepala Dusun II Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Pertanyaan
Membandingkan	a. Apa saja alat-alat yang digunakan ketika membandingkan hasil dari suatu program kegiatan desa dengan target yang ditetapkan sebelumnya? b. Apa saja hal yang bisa menyebabkan target suatu program kegiatan desa tidak mencapai standar yang telah dibuat?

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Responsibilitas	a. Apa saja reaksi yang diberikan masyarakat desa pada saat menerima bantuan dari pemerintah desa? b. Dimana saja tempat penyaluran bantuan bagi masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kuantitas	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa membuat rencana kerja bulanan, semester, dan tahunan? b. Berapa item uraian tugas bapak sebagai personil aparat desa pada bidang tugas yang bapak emban? c. Berapa persen target minimal penyelesaian rencana program kerja yang harus bapak selesaikan sebagai personil aparat desa? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa melaporkan jumlah persentase program kerja yang telah bapak laksanakan dalam jangka waktu tertentu kepada Kepala Desa? e. Apakah hasil capaian penyelesaian kerja bapak dalam dua tahun terakhir mencapai target maksimum seratus persen?
Ketepatan Waktu	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa diwajibkan menyelesaikan sejumlah beban kerja dalam rentang waktu perhari, perminggu, dan

	perbulan? b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa wajib membuat capaian progres kerja mingguan, bulanan, dan tahunan?
Kemandirian	a. Apakah bapak sebagai personil aparat desa mempunyai komitmen yang kuat dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat? b. Apakah bapak sebagai personil aparat desa selalu tepat waktu ketika masuk dan keluar kantor setiap hari kerja? c. Apakah bapak sebagai personil aparat desa bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas-tugas yang bapak emban? d. Apakah bapak sebagai personil aparat desa menguasai betul tugas yang bapak emban sehingga hasilnya memuaskan? e. Bagaimana bapak sebagai personil aparat desa bekerja jika tidak sedang diawasi oleh pimpinan?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Monitoring	
Indikator	Hasil Wawancara
Membandingkan	<i>“Beberapa alat yang kami gunakan dalam melaksanakan dan mengukur ketepatan kerja kami contohnya adalah meteran, kamera, dan lainnya. Hal-hal yang dapat menghambat dan menyebabkan program kegiatan desa tidak mencapai target salah satunya adalah faktor cuaca dan bencana, misalnya hujan dan banjir.”</i>

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Responsibilitas	<i>“Reaksi masyarakat desa saat menerima bantuan dari pemerintah desa secara umumnya adalah merasa senang. Bantuan itu kami salurkan di kantor desa dan di balai desa.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kuantitas	<i>“Saya sesuai tupoksi membuat rencana kerja baik it bulanan, semester, dan tahunan. Tugas saya sebagai salah seorang aparat desa kurang lebih ada sepuluh.”</i>

	<i>Dalam melaksanakan program kerja, target penyelesaian minimal saya adalah delapan puluh persen. Persentase tersebut akan saya laporkan secara berkala kepada kepala desa. Selama dua tahun terakhir, hasil capaian penyelesaian kerja saya masih belum mencapai seratus persen.</i>
Ketepatan Waktu	<i>“Saya diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja, menyesuaikan dengan situasi atau program yang sedang berjalan. Kemudian saya membuat laporan capaian progres kerja baik itu mingguan, bulanan, dan tahunan.”</i>
Kemandirian	<i>“Dalam menjalankan tugas saya, saya memiliki komitmen yang baik, tepat waktu, bertanggung jawab, serta menguasai tugas-tugas yang saya emban. Meskipun tidak sedang diawasi oleh atasan, saya tetap menjalankan pekerjaan saya sesuai dengan beban kerja yang wajib saya laksanakan.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Kasieli Halawa
Jabatan : Warga Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 21 Desember 2023

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Kecukupan	a. Apakah program kegiatan desa yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir telah berhasil menjawab tuntutan kepentingan masyarakat desa?
Responsibilitas	a. Setelah menerima bantuan dari pemerintah desa, apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa merasa puas? b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan pemerintah desa tersebut?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan? b. Apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja telah meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	a. Apakah hasil kerja dari BPD dan aparat desa cukup memuaskan atau tidak? b. Berapa lama produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? c. Apakah program kerja yang dikerjakan oleh BPD dan aparat desa sudah bermutu tinggi?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Kecukupan	<i>"Untuk dua tahun terakhir, saya pikir tuntutan kepentingan masyarakat sudah berhasil terjawab oleh program kegiatan desa."</i>
Responsibilitas	<i>"Sebagai salah satu masyarakat yang menerima"</i>

	<i>bantuan, saya tentunya merasa puas. Tetapi orang-orang yang belum kebagian atau tidak menerima bantuan, tentu saja merasa tidak puas. Peningkatan kesejahteraan hanya terlihat bagi yang telah menerima bantuan. Dan tentu saja bagi yang tidak menerima bantuan, tidak ada sama sekali.”</i>
Ketetapan	<i>“Dibandingkan sebelum menerima bantuan, setelah menerima bantuan masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang kemudian meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk program pelatihan yang telah berhasil dilaksanakan, ada terlihat peningkatan dari skill atau sumber daya masyarakat desa.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	<i>“Hasil kerja dari aparat desa dan BPD sebagian cukup memuaskan, namun sebagian ada yang tidak. Produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun tahun program itu dilaksanakan. Program kerja yang dilaksanakan oleh BPD dan aparat desa tidak bisa saya bilang memiliki mutu yang tinggi, tetapi semua program yang dilaksanakan kami terima dengan baik.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Hendra Situmorang
Jabatan : Warga Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Jum'at, 2 Februari 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Kecukupan	a. Apakah program kegiatan desa yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir telah berhasil menjawab tuntutan kepentingan masyarakat desa?
Responsibilitas	a. Setelah menerima bantuan dari pemerintah desa, apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa merasa puas? b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan pemerintah desa tersebut?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan? b. Apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja telah meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	a. Apakah hasil kerja dari BPD dan aparat desa cukup memuaskan atau tidak? b. Berapa lama produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? c. Apakah program kerja yang dikerjakan oleh BPD dan aparat desa sudah bermutu tinggi?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Kecukupan	<i>"Selama dua tahun terakhir, menurut saya program kegiatan desa tidak berhasil dalam menjawab tuntutan masyarakat desa."</i>
Responsibilitas	<i>"Saya merasa tidak puas akan pelayanan pemberian"</i>

	<i>bantuan dari desa, karena belakangan ini kami sudah lama tidak menerima bantuan, meskipun sebelumnya kami sudah terdaftar sebagai penerima. Tetapi sekarang nama kami dihapus. Bagi yang sudah menerima bantuan, saya rasa tidak nampak adanya peningkatan kesejahteraan.”</i>
Ketetapan	<i>“Sepengetahuan saya, tidak ada peningkatan taraf hidup bagi masyarakat penerima bantuan dari pemerintah desa. Meskipun terkadang ada pelatihan kerja bagi masyarakat, sumber daya manusia dari penduduk desa tidak bisa dibilang meningkat.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	<i>“Hasil kerja dari BPD dan aparat desa tidak memuaskan sama sekali, karena kurang bermutu. Untuk saya pribadi, saya tidak dapat memanfaatkan produk kerja apapun dari perangkat desa.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Valentina Yanitia Zebua
Jabatan : Warga Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 21 Desember 2023

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Kecukupan	a. Apakah program kegiatan desa yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir telah berhasil menjawab tuntutan kepentingan masyarakat desa?
Responsibilitas	a. Setelah menerima bantuan dari pemerintah desa, apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa merasa puas? b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan pemerintah desa tersebut?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan? b. Apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja telah meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	a. Apakah hasil kerja dari BPD dan aparat desa cukup memuaskan atau tidak? b. Berapa lama produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? c. Apakah program kerja yang dikerjakan oleh BPD dan aparat desa sudah bermutu tinggi?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Kecukupan	<i>"Selama dua tahun terakhir, program kegiatan desa belum dapat menjawab semua tuntutan dari masyarakat desa."</i>
Responsibilitas	<i>"Meskipun ada bantuan dari pemerintah desa, kami</i>

	<i>masyarakat desa masih belum merasa puas, karena terkadang ada ketidaksesuaian antara apa yang dibidang atau direncanakan sebelumnya, dengan apa yang nyatanya diberikan kepada kami masyarakat. Selain itu dari segi kesejahteraan penerima bantuan, masih belum bisa dibidang meningkat.”</i>
Ketetapan	<i>“Meskipun telah menerima bantuan, taraf hidup masyarakat desa tetap saja tidak meningkat. Pelatihan yang dilaksanakan juga masih belum dapat meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa secara signifikan.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	<i>“Mengenai kepuasan, hasil kerja BPD dan aparat desa menurut saya masih belum memuaskan. Produk dari program kerja desa juga hanya bisa dimanfaatkan dalam waktu singkat dan tidak berkelanjutan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa program kerja yang dilaksanakan oleh BPD dan aparat desa masih belum bermutu tinggi.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dameati Telaumbanua
Jabatan : Warga Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 21 Desember 2023

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Kecukupan	a. Apakah program kegiatan desa yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir telah berhasil menjawab tuntutan kepentingan masyarakat desa?
Responsibilitas	a. Setelah menerima bantuan dari pemerintah desa, apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa merasa puas? b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan pemerintah desa tersebut?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan? b. Apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja telah meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	a. Apakah hasil kerja dari BPD dan aparat desa cukup memuaskan atau tidak? b. Berapa lama produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? c. Apakah program kerja yang dikerjakan oleh BPD dan aparat desa sudah bermutu tinggi?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Kecukupan	<i>"Menurut saya program kegiatan desa selama dua tahun terakhir sudah memuaskan dan berhasil menjawab tuntutan dari masyarakat desa."</i>
Responsibilitas	<i>"Untuk bantuan yang saya terima, saya merasa puas"</i>

	<i>dengan hal yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Tetapi dari sisi kesejahteraan, saya pikir masih sama tanpa adanya peningkatan.”</i>
Ketetapan	<i>“Taraf hidup masyarakat yang telah menerima bantuan masih belum terlihat adanya peningkatan. Begitu juga dengan program pelatihan yang dilaksanakan oleh desa, masih belum dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa.”</i>

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	<i>“Hasil kerja dan dan penerapan dari BPD dan aparat desa, sudah cukup memuaskan. Produk kerja dari pemerintahan desa sudah cukup bertahan lama, contohnya pembangunan toilet yang sudah diterima oleh masyarakat termasuk saya salah satunya. Kalau dari segi mutu kerja, saya rasa biasa saja baik itu BPD maupun aparat desa.”</i>

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Elifati Zebua
Jabatan : Warga Desa Sihare'o Siwahili
Hari/Tgl Wawancara : Kamis, 21 Desember 2023

B. DAFTAR PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Pertanyaan
Kecukupan	a. Apakah program kegiatan desa yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir telah berhasil menjawab tuntutan kepentingan masyarakat desa?
Responsibilitas	a. Setelah menerima bantuan dari pemerintah desa, apakah bapak/ibu sebagai masyarakat desa merasa puas? b. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan pemerintah desa tersebut?
Ketetapan	a. Apakah masyarakat desa penerima bantuan meningkat taraf hidupnya dibanding sebelum menerima bantuan? b. Apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja telah meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa?

Kinerja	
Indikator	Pertanyaan
Kualitas Kerja	a. Apakah hasil kerja dari BPD dan aparat desa cukup memuaskan atau tidak? b. Berapa lama produk kerja dari perangkat desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? c. Apakah program kerja yang dikerjakan oleh BPD dan aparat desa sudah bermutu tinggi?

C. HASIL WAWANCARA / JAWABAN DARI PERTANYAAN

Evaluasi	
Indikator	Hasil Wawancara
Kecukupan	<i>"Sebagai warga Desa Sihare'o Siwahili, secara probadi saya merasakan belum puas, karena hasil kerja pemerintah Desa Sihare'o Siwahili belum merata. Kalau kita perhatikan dari pembangunan,</i>

	<p>masih tidak merata. Lebih condong pembangunannya diberikan bagi masyarakat yang ada bantuan secara kekeluargaan dengan perangkat desa. Hal yang sama juga terjadi dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa, tidak merata. Malah ada bantuan yang seharusnya diberikan kepada yang kurang mampu, tetapi dialihkan pemberiannya kepada orang yang cukup mampu dan tidak layak untuk menerima bantuan. Masih juga banyak tuntutan-tuntutan lainnya dari masyarakat Desa Sihare'o Siwahili yang belum terjawab oleh pemerintah desa.”</p>
Responsibilitas	<p>“Menurut pribadi saya, yang namanya bantuan ini seharusnya disalurkan kepada masyarakat desa yang betul-betul membutuhkan. Tapi yang terjadi nyatanya tidak ada pemerataan, seperti yang terjadi pada penerima BLT. Banyak peraturan-peraturan yang telah dilanggar langsung oleh perangkat-perangkat desa. Sudah ada kejadian dimana masyarakat desa menyampaikan surat kepada pemerintah Kecamatan Gunungsitoli karena ketidakadilan yang diperbuat oleh perangkat desa. Yang saya maksud dalam hal ini adalah ketika mereka mengadakan rapat atau musyawarah desa, mereka seolah-olah mengambil saran dan masukan dari masyarakat, tetapi sebenarnya mereka telah mengambil keputusan sebelum melakukan musyawarah tersebut. Masyarakat hanya ada untuk mendengarkan saja, semuanya mereka putuskan tanpa musyawarah dan masukan dari masyarakat desa. Kalau kita bicara soal kesejahteraan, maka ini akan berkaitan langsung dengan perekonomian warga. Menurut apa yang saya lihat, meskipun ada bantuan dari desa, tidak ada pengaruhnya bagi perekonomian warga. Seperti halnya pada bantuan ayam petelur yang diberikan oleh pemerintah desa sebelumnya. Dimana seharusnya pemerintah desa memberikan pemahaman pada masyarakat penerima bantuan bagaimana cara berternak dengan ayam petelur, karena sangat beda caranya beternak ayam kampung dengan ayam petelur. Banyak warga yang merasa dirugikan karena mereka tidak tahu cara beternak ayam petelur, sehingga menyebabkan ayam tersebut mati dan merugikan warga karena sia-sia merawatnya.”</p>
Ketetapan	<p>“Banyak hal yang sangat kami sayangkan sekali khususnya sebagai warga Desa Sihare'o Siwahili. Bahwasanya dengan adanya pengadaan bantuan ternak seperti ikan lele atau ayam, kami berharap adanya peningkatan perekonomian bagi kami warga</p>

Desa Sihare'o Siwahili. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Pada pengadaan bantuan ikan lele, mereka memang sudah menyalurkannya. Tapi masyarakat secara umum masih awam dan tidak tahu bagaimana cara beternak ikan lele. Ditambah lagi ikan lele yang diberikan masih sangat kecil. Yang direncanakan sebelumnya adalah ikan lele yang berukuran sepuluh sampai dua belas sentimeter. Sementara yang disalurkan kepada masyarakat tidak sampai sepuluh sentimeter, bahkan ada yang hanya enam sentimeter, sehingga merugikan warga. Ditambah lagi banyak ikan lele yang kemudian mati sehingga merugikan warga yang telah menghabiskan uang untuk membeli pakan lele selama ini. Kalau untuk pelatihan kerja, setahu saya tidak pernah diadakan di Desa Sihare'o Siwahili khususnya di dusun satu ini. Mungkin ada yang pernah dilaksanakan, tetapi saya sebagai warga tidak pernah merasakan dan tidak pernah menerima program pelatihan tersebut. Mungkin hanya sebagian masyarakat saja yang menerimanya, tidak semua."

Kinerja	
Indikator	Hasil Wawancara
Kualitas Kerja	<p><i>"Salah satu hal yang kami sayangkan dari BPD dan perangkat desa adalah hasil kerja mereka yang masih tidak memuaskan. Sebagai yang memegang jabatan dalam pemerintahan desa, kami berharap bawa mereka berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tetapi saya perhatikan²³ bahwa semua perangkat desa ini, pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena adanya ketidakadilan, tidak adanya pemerata³³. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil atau produk kerja perangkat desa ini seberapa lama dapat dimanfaatkan, itu tidak bergantung pada masyarakat. Sebenarnya pemerintah desa harusnya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, mereka yang menentukan, dan hanya mereka yang bisa menjawab hal tersebut. Kalau soal pembangunan yang dilakukan di desa ini, menurut sayamasih kurang maksimal. Conto²⁹ beberapa tahun yang lalu di dusun dua, pada pembangunan jembatan penghubung antara desa dengan kebun warga di arah dusun dua. Kami perhatikan sampai sekarang ini bahwa bagian dasar jembatan itu tergerus air dan banjir, karena</i></p>

pada bagian bawah atau pondasi itu tidak ada diberikan batu-batu yang besar. Hanya ada batu-batu kecil sebagai penyokong jembatan itu, padahal dana yang telah disiapkan oleh pemerintah sangatlah banyak.”

PERAN BPD DALAM MONITORING DAN EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA SIHARE'O SIWAHILI

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unigal.ac.id Internet	1554 words — 5%
2	repository.stiedewantara.ac.id Internet	725 words — 2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet	513 words — 2%
4	www.coursehero.com Internet	384 words — 1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet	279 words — 1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	231 words — 1%
7	ejournal2.undiksha.ac.id Internet	205 words — 1%
8	123dok.com Internet	187 words — 1%
9	repository.unibos.ac.id Internet	177 words — 1%

10	etheses.uin-malang.ac.id Internet	162 words — 1%
11	repository.fisip-untirta.ac.id Internet	159 words — 1%
12	www.jogloabang.com Internet	157 words — 1%
13	eprints.pancabudi.ac.id Internet	141 words — < 1%
14	pdffox.com Internet	131 words — < 1%
15	nanopdf.com Internet	121 words — < 1%
16	repo.apmd.ac.id Internet	118 words — < 1%
17	repository.ub.ac.id Internet	116 words — < 1%
18	repository.uir.ac.id Internet	114 words — < 1%
19	bajangjournal.com Internet	108 words — < 1%
20	Yusnidar Lase, Ayler Beniah Ndraha. "ANALISIS URGENSI PELATIHAN DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023	104 words — < 1%

21	ojs.fisip-unmura.com Internet	101 words — < 1%
22	repository.unhas.ac.id Internet	100 words — < 1%
23	repo.unand.ac.id Internet	98 words — < 1%
24	jurnal.unpad.ac.id Internet	89 words — < 1%
25	eprints.umsb.ac.id Internet	85 words — < 1%
26	eprints.umg.ac.id Internet	81 words — < 1%
27	repository.stkippacitan.ac.id Internet	77 words — < 1%
28	zahiraccounting.com Internet	69 words — < 1%
29	repository.ar-raniry.ac.id Internet	64 words — < 1%
30	repository.radenintan.ac.id Internet	58 words — < 1%
31	repositori.usu.ac.id Internet	57 words — < 1%
32	docplayer.info Internet	56 words — < 1%

33	repository.unigal.ac.id:8080 Internet	55 words — < 1%
34	ejournal2.undip.ac.id Internet	54 words — < 1%
35	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	54 words — < 1%
36	repository.uinjambi.ac.id Internet	53 words — < 1%
37	uia.e-journal.id Internet	53 words — < 1%
38	book.penerbit.org Internet	51 words — < 1%
39	repository.uma.ac.id Internet	48 words — < 1%
40	serupa.id Internet	47 words — < 1%
41	adoc.pub Internet	45 words — < 1%
42	journal.stieamkop.ac.id Internet	43 words — < 1%
43	journal.ukmc.ac.id Internet	43 words — < 1%
44	id.123dok.com Internet	42 words — < 1%

45	Firman Firman. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa", <i>Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum</i> , 2020 Crossref	41 words — < 1%
46	repo.darmajaya.ac.id Internet	41 words — < 1%
47	Dwi Widi Pratito Sri Nugroho, Puput Adi Saputro. "UPAYA – UPAYA MEMPERTAHANKAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. PERTAMINA LUBRICANTS REGION IV SEMARANG (Pada Produk Fastron)", <i>Solusi</i> , 2020 Crossref	40 words — < 1%
48	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet	40 words — < 1%
49	repository.upstegal.ac.id Internet	40 words — < 1%
50	meseptiandrianiiskandar.blogspot.com Internet	36 words — < 1%
51	www.kampungbaru.go.id Internet	33 words — < 1%
52	eprints.poltektegal.ac.id Internet	32 words — < 1%
53	repository.uinjkt.ac.id Internet	32 words — < 1%
54	repository.uinsu.ac.id Internet	30 words — < 1%
55	Niska Walfiatni Waruwu, Ayler Beniah Ndraha, Meiman Waruwu, Eliagus Telaumbanua.	29 words — < 1%

"EVALUASI PELATIHAN GURU DI SMP NEGERI 3 HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023

Crossref

56 Susi Susilawati, Junita Lubis, Siti Lam'ah Nasution. "Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Bilah Hilir", remik, 2023

28 words — < 1%

Crossref

57 mail.bpsdmd.jatengprov.go.id

Internet

28 words — < 1%

58 repositori.umsu.ac.id

Internet

28 words — < 1%

59 text-id.123dok.com

Internet

28 words — < 1%

60 core.ac.uk

Internet

27 words — < 1%

61 eprints.walisongo.ac.id

Internet

26 words — < 1%

62 Abang Zainudin, Mangut Riadi. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan", FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2023

24 words — < 1%

Crossref

63 Sofyan Malik. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", Jurnal Ius Constituendum, 2020

24 words — < 1%

Crossref

64	jdih.sumutprov.go.id Internet	24 words — < 1%
65	journals.usm.ac.id Internet	24 words — < 1%
66	keputran.pekalongankota.or.id Internet	24 words — < 1%
67	repository.unja.ac.id Internet	24 words — < 1%
68	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	21 words — < 1%
69	eprints.unmas.ac.id Internet	21 words — < 1%
70	jurnal.jomparnd.com Internet	21 words — < 1%
71	comflit.com Internet	20 words — < 1%
72	ejournal.unesa.ac.id Internet	20 words — < 1%
73	www.edukasinfo.com Internet	20 words — < 1%
74	www.prin.or.id Internet	20 words — < 1%
75	www.scribd.com Internet	20 words — < 1%

-
- 76 Ronales Alan Sagita, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2024
Crossref 19 words — < 1%
-
- 77 es.scribd.com
Internet 19 words — < 1%
-
- 78 Emanuel Yansen Berek, Dian Festianto, Yakobus Kolne. "RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR", Jurnal Poros Politik, 2021
Crossref 18 words — < 1%
-
- 79 repository.umsu.ac.id
Internet 18 words — < 1%
-
- 80 usaharumahan.id
Internet 18 words — < 1%
-
- 81 docobook.com
Internet 17 words — < 1%
-
- 82 Moch. Ardiansyah, Isnaini Rodiyah. "Mengevaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia", Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, 2024
Crossref 16 words — < 1%
-
- 83 Sabri Sabri, Eka Febrianti, Asnah Asnah, Nasfi Nasfi. "Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek 16 words — < 1%

Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2019

Crossref

-
- 84 download.garuda.kemdikbud.go.id 16 words — < 1%
Internet
-
- 85 dspace.uui.ac.id 16 words — < 1%
Internet
-
- 86 juliwi.com 16 words — < 1%
Internet
-
- 87 repository.umj.ac.id 16 words — < 1%
Internet
-
- 88 Dinaría Br Sembiring. "Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Dosen AMIK Medicom", remik, 2021 15 words — < 1%
Crossref
-
- 89 pendidikan.dynastyapp.org 15 words — < 1%
Internet
-
- 90 zombiedoc.com 15 words — < 1%
Internet
-
- 91 Tri Endang Yani, Iwan Prasetyo. "STRATEGI MENINGKATKAN LOYALITAS DENGAN PELAYANAN PRIMA, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DAN KEPUASAN PELANGGAN", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2020 14 words — < 1%
Crossref
-
- 92 ejournal.unaja.ac.id 14 words — < 1%
Internet

93	repository.uhamka.ac.id Internet	14 words — < 1%
94	Ainun Wulandari, Kartini Aprianti. "PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA", SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS, 2023 Crossref	13 words — < 1%
95	eprints.uny.ac.id Internet	13 words — < 1%
96	repository.iainambon.ac.id Internet	13 words — < 1%
97	Iana Zalili, Pieter Sammy Soselisa, Julia T. Patty. "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon", BAILEO : JURNAL SOSIAL HUMANIORA, 2023 Crossref	12 words — < 1%
98	pelangipsikologi.wordpress.com Internet	12 words — < 1%
99	Lucky Fiktori Zai, Ayler Beniah Ndraha, Syah Abadi Mendrofa, Palindungan Lahagu. "ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN LOLOFITU MOI", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023 Crossref	11 words — < 1%
100	kpmDKLurahan.wordpress.com Internet	11 words — < 1%

101	repository.upp.ac.id Internet	11 words — < 1%
102	vdokumen.com Internet	11 words — < 1%
103	ejurnal.unima.ac.id Internet	10 words — < 1%
104	jurnal.ubl.ac.id Internet	10 words — < 1%
105	kodepos.co.id Internet	10 words — < 1%
106	mattabulu.desa.id Internet	10 words — < 1%
107	repo.uinsatu.ac.id Internet	10 words — < 1%
108	repository.unsri.ac.id Internet	10 words — < 1%
109	Fusnika Fusnika, Septha Suseka, Aprillianti Bunga Lestari. "UPAYA PEMERINTAH DESA JERORA SATU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DI ERA REFORMASI 4.0 PADA TAHUN 2020", JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2021 Crossref	9 words — < 1%
110	Heru Cahyono, Kurniasih Mufidayati. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN APBDDES SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021 Crossref	9 words — < 1%

-
- 111 Sane'a Sane'a, Isna Fitria Agustina. "PERAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KECAMATAN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 9 words — < 1%
Crossref
-
- 112 Sri Sutjiatmi, Tomy Wijayanto. "Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2018 9 words — < 1%
Crossref
-
- 113 ana1976.blogspot.com 9 words — < 1%
Internet
-
- 114 eprints.iain-surakarta.ac.id 9 words — < 1%
Internet
-
- 115 eprints.ums.ac.id 9 words — < 1%
Internet
-
- 116 repository.uksw.edu 9 words — < 1%
Internet
-
- 117 www.iklanetindo.com 9 words — < 1%
Internet
-
- 118 Septiawati Septiawati, Achmad Hizazi, Fitriani Mansur. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA APARAT DESA DI KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN MERANGIN)", Jambi Accounting Review (JAR), 2022 8 words — < 1%
Crossref
-

119	adighazy.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
120	digilib.uin-suka.ac.id Internet	8 words — < 1%
121	ejournal.uniks.ac.id Internet	8 words — < 1%
122	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet	8 words — < 1%
123	ejurnal.univalabuhanbatu.ac.id Internet	8 words — < 1%
124	eprints.umm.ac.id Internet	8 words — < 1%
125	fdj-indrakurniawan.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
126	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet	8 words — < 1%
127	jurnal.peneliti.net Internet	8 words — < 1%
128	jurnal.stiatabalong.ac.id Internet	8 words — < 1%
129	peraturan.bpk.go.id Internet	8 words — < 1%
130	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	8 words — < 1%
131	repositori.umrah.ac.id	

Internet

8 words — < 1%

132 repository.uniyap.ac.id

Internet

8 words — < 1%

133 repository.unj.ac.id

Internet

8 words — < 1%

134 www.bangkalankab.go.id

Internet

8 words — < 1%

135 www.online-journal.unja.ac.id

Internet

8 words — < 1%

136 Moeljono Moeljono. "MUSRENBANG ACARA CEREMONIAL ATAU PENYERAPAN ASPIRASI (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah)", Solusi, 2019

Crossref

7 words — < 1%

137 digilib.uinsgd.ac.id

Internet

7 words — < 1%

138 Anies Indah Hariyanti. SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business, 2017

Crossref

6 words — < 1%

139 Christiany Juditha. "DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI TERHADAP POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA (Studi Di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung)", Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 2020

Crossref

6 words — < 1%

Desi Rusfiani, Ria Nelly Sari, Yesi Mutia Basri.

"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Alokasi Dana Desa dengan Budaya Tunjuk Ajar Melayu di Desa

Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Bengkalis", Jurnal IAKP: Jurnal

Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2022

Crossref

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE SOURCES < 1 WORDS

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF